



LAPORAN BERJENJANG TRIWULAN IV

DINAS PERHUBUNGAN

2025



KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN TRIWULAN IV
BIDANG LALU LINTAS DAN KESELAMATAN
JALAN



KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas, Keselamatan Jalan dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor;
2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan;
3. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penerangan jalan umum;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan memeperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Kepala Dinas Perhubungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	44,70%
1.1	Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	85,2%
1.2	Beroperasinya angkutan wajib uji yang laik jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	9,19 %
1.3	Meningkatnya efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas	Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	85%

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 10.590.347.389,00	APBD
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 9.852.382.889,00	APBD
2.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 366.000.000,00	APBD
3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 371.964.500,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	44,70%	44,70%	44,88%	100,4%

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat

Indikator 1 : Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan pelayanan melalui layanan transportasi darat adalah upaya terencana dan terukur untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan transportasi darat agar semakin aman, nyaman, terjangkau, andal, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi. Terpasangnya kelengkapan jalan sesuai dengan kondisi ideal memberikan dampak strategis dalam meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas, serta kualitas pelayanan transportasi darat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Untuk mendapatkan Persentase Kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal = Jumlah kelengkapan jalan yang terpasang dibandingkan dengan Jumlah Kebutuhan Ideal perlengkapan jalan. Dimana perlengkapan jalan terdiri dari rambu, marka, guardrail, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan

- Formulasi % Kelengkapan Jalan yg Telah Terpasang Terhadap Jumlah Ideal
 = Jumlah Kelengkapan jalan yg Terpasang/Jumlah Kebutuhan Ideal
 = 421.580/188.256
 = 44,88%

Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat

Indikator 1.1 : Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah seluruh fasilitas pendukung jalan yang disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara jalan ada, terpasang, terpelihara, dan beroperasi sesuai dengan standar teknis serta peruntukannya, sehingga dapat mendukung keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	85,2 %	85,2 %	85,2 %	100 %

Kegiatan ini meliputi penyediaan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum warning light, traffic light dan halte bus sekolah yang berfungsi dengan baik dengan capaian 85,2% dimana perlengkapan jalan yang disediakan berfungsi dengan baik.

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum Poros Burau-Wotu-Malili 214 titik, PJU Ujung Suso 36 Unit, PJU lingkungan Bulu-Bulu 28 Unit, PJU Desa Watangpanua, Tampinna, Tawakua 30 Titik, PJU kantor Bupati 7 Unit, PJU desa Sorowako 8 Unit. Sehingga Total Penerangan Jalan Umum yang terbangun ditahun 2025 sebanyak 323 Unit. Adapun Stasiun Bus (Halte) yang terbangun ditahun ini sebanyak 1 unit.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin

Sasaran 1.2 : Beroperasinya Angkutan Wajib Uji yang Laik Jalan

Indikator 1.2 : Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang secara hukum diwajibkan menjalani uji berkala (uji KIR) telah lulus uji kelaikan jalan dan dioperasikan di jalan dalam kondisi teknis yang memenuhi persyaratan keselamatan. Formulasi Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan

- Persentase wajib uji yang laik jalan
 = Rencana Kendaraan yang lolos uji (laik jalan)/
 Rencana Jumlah Kendaraan wajib uji
 = (172/ 1871)
 = 9,19 %

Telah dilaksanakan Proses akreditasi unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada bulan Desember 2025 oleh direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Berita acara hasil Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : 73/UBKP-AKR/XII/2025, UPUBKB Dinas Perhubungan Luwu Timur memperoleh Akreditasi B dengan beberapa catatan, antara lain :

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor
- b. Belum lengkapnya peralatan uji, yaitu Sound Level Meter, genset dan alat pemadam kebakaran
- c. Adanya kerusakan pada saat uji Side Slip tester
- d. Perlunya pemasangan rambu pendahulu petunjuk arah menuju UPUBKB Dinas perhubungan Kabupaten Luwu Timur

Terhadap kekurangan tersebut, telah disusun Action Plan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 500.11/1359/Dishub tentang penyampaian Komitmen Rencana aksi, yang menyatakan bahwa pemenuhan seluruh kekurangan dimaksud akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu empat (4) tahun.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja Sasaran 1.2 indikator 1.2 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

No.	Sasaran	Indikator	Target 2025	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Beroperasinya angkutan wajib uji yang laik jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	9,19 %	9,19 %	9,19 %	100%

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Selama triwulan IV mulai bulan Oktober sampai bulan Desember tidak ada pengujian hanya dilakukan registrasi kendaraan wajib uji kepada 172 unit kendaraan yang akan melakukan numpang uji di Kabupaten lain.
- b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan terhadap 8 unit alat pengujian untuk mengkalibrasi menguji keakurasian alat yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga dilakukan penggantian suku cadang pada alat yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik. Alat pengujian yang akurat dapat memastikan kendaraan yang diuji KIR telah aman, nyaman dan laik jalan.

Sasaran 1.3 : Meningkatnya Efisiensi, Keselamatan, dan Kenyamanan Lalu Lintas.

Indikator 1.3 : Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan lebih optimal, aman, dan ramah bagi pengguna jalan, sebagai hasil dari kondisi prasarana, sarana, serta manajemen lalu lintas yang berfungsi dengan baik. Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas melalui pengaturan, pengendalian, serta rekayasa lalu lintas yang terencana dan berbasis kondisi aktual jaringan jalan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya mobilitas perkotaan yang tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan keselamatan pengguna jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota.

Persentase Rekomendasi Manajemen dan rekaya Lalu Linas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota :

- = Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti/ Jumlah Rekomendasi yang diajukan
- = 16 Laporan/ 16 Laporan
- = 100%

Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja Sasaran 1.3 indikator 1.3 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi Geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekayasa

lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa. Adapun Jumlah Rekomendasi yang telah dikeluarkan selama tahun 2025 yaitu sebanyak 16 rekomendasi. Diantaranya :

1. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Kerikil Berpasir Alami di Sungai Kalena Kelurahan Margalembo Kec. Mangkutana Kab. Luwu timur
2. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Batu Gunung Quarry Besar di Jalan Trans Desa Balaikembang Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur
3. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Kerikil Berpasir Alami Sungai Kalena desa Teromo Kec. Mangkutana.
4. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Mineral Logamm (Nikel) di Towuti dan wasuponda
5. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Kec. Malili
6. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pertambangan Golongan Batuan di desa Asuli Kec. Towuti
7. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Desa Maliwowo dan Desa Watangpanua Kec. Angkona

8. Rekomendasi andalalin Kegiatan Pembangunan Fasilitas Aspal Machine Plant (AMP) di desa Balambano Kec. Wasuponda
9. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pertambangan Mineral Non Logam (Batu Gamping) Desa Kawat Kec. Wasuponda
10. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Towuti Desa Wawondula Timampu Desa Matompi Kec. Towuti
11. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hualii Nickel Kab. Luwu Timur
12. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pertambangan Go. Batuan Komoditas Tanah Urug Desa Lamaeto Kec. Angkona
13. Rekomendasi Andalalin Pembangunan Pasar Malindungi Desa Nikkel Kec. Nuha.
14. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Malili Daerah Malili Kab. Luwu Timur
15. Rekomendasi Andalalin kegiatan Pembangunan Mall Pelayanan Publik di jalan H.
16. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Pasar Wasuponda.

No	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas	Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	85%	100%	100%	117,64%

Kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan yaitu :

- a). Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.
- b) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, demi terciptanya sistem transportasi di wilayah perkotaan yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat

Tabel 3.15
Tabel Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah Kecelakaan	254
2	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum	120
3	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum Barang	51
4	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Rusak	0
5	Jumlah Kecelakaan Karena Karena Rambu-Rambu Lalu Lintas	0
6	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Kendaraan	0

A. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		%
				(Rp)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.509.347.389	10.509.347.389	6.994.652.566,94	66,05 %	66,05 %
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.852.382.889	9.852.382.889	6.412.983,317,94	65.09%	65.09%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.868.820.989	5.868.820.989	2.524.619.807,94	43.02%	43.02%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.983.561.900	3.983.561.900	3.888.363.509	97,61%	97,61%
2.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	366.000.000	366.000.000	230.379.720	73,99%	73,99%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	113.000.000	113.000.000	45.442.735	40,21%	40,21%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253.000.000	253.000.000	225.352.000	89,07%	89,07%
3.	Pelaksanaan Manajemen dan	371.964.500	371.964.500	351.289.529	94,44%	94,44%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		%
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	362.073.500	362.073.500	341.772.529	94.39%	94.39%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9.891.000	362.073.500	9.517.000	96.22%	96.22%

Adapun Sisa Anggaran dikarenakan oleh :

1. Sisa anggaran sebesar Rp3.095.740.050 merupakan nilai sebesar 95% dari kontrak pengadaan PJU pada ruas Poros Wotu–Burau yang hingga akhir tahun anggaran belum direalisasikan pembayarannya kepada rekanan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp248.461.131 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog.
2. Sisa anggaran sebesar Rp95.198.391 merupakan akumulasi sisa anggaran belanja pemeliharaan PJU, warning light, traffic light, dan papan nama jalan, sisa anggaran jasa pemeliharaan rambu, serta sisa anggaran pembayaran tagihan listrik PJU yang realisasinya lebih rendah dari perencanaan.
3. Sisa anggaran sebesar Rp62.500.000 merupakan belanja Smart Card yang tidak dapat dilaksanakan karena akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp3.000.000 merupakan sisa belanja upah jasa tenaga perhubungan yang tidak dibayarkan akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.057.265 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog.
4. Sisa anggaran sebesar Rp13.500.000 merupakan belanja upah jasa tenaga Perhubungan yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp1.503.882 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat. Dan anggaran Rp8.304.853 merupakan sisa perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas

5. Sisa anggaran sebesar Rp.374.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan perjalanan dinas

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Perhubungan Darat triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 104,51%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Bidang lalu Lintas dan Keselamatan Jalan.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)		(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	44,70%	44,88%	100,4%
1.1	Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	85,2%	85,2%	100%
1.2	Beroperasinya angkutan wajib uji yang laik jalan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Laik Jalan (%)	9,19 %	9,19 %	100 %
1.3	Meningkatnya efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas	Persentase rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)	85%	100%	117,64%

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Akan dilakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan di jalan agar dapat melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang belum melakukan uji KIR
- Pemeliharaan penerangan jalan umum untuk terus diberi perhatian terutama penambahan anggaran pemeliharaan

Malili, 12 Januari 2026
Kabid Lalu Lintas & Keselamatan
Jalan


JAMALUDDIN A.S.Sos

LAPORAN TRIWULAN IV

KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS, FASILITAS
KESELAMATAN JALAN, DAN PENERANGAN JALAN UMUM



KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum;
7. Menyiapkan peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan standar teknis rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

8. Mengumpulkan dan mengolah data pengukuran kinerja lalu lintas (traffic counting) pada persimpangan jalan, jalur jalan nasional, provinsi dan kabupaten, sebagai bahan evaluasi perencanaan, pengembangan dan rekayasa jalan;
9. Melakukan inventarisasi dan pendataan daerah berpotensi / rawan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan, simpang jalan, kawasan atau lokasi lain dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian mengkoordinasikan perencanaan rekayasa lalu lintas termasuk pemasangan rambu – rambu lalu lintas atau peralatan keselamatan lainnya;
10. Melakukan dan mengkoordinasikan rekayasa lalu lintas dilokasi kecelakaan jika diminta oleh instansi terkait termasuk pemasangan rambu – rambu lalu lintas atau peralatan keselamatan lainnya;
11. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kelas jalan di jalan Kabupaten dengan persetujuan bupati;
12. Melakukan dan mengkoordinasikan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
13. Menyusun bahan telaahan ke pimpinan terkait permohonan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
14. Menyusun peta potensi dan peta kinerja lalu lintas yang menjadi kewenangannya;
15. Melakukan inventarisasi dan pendataan ruas jalan, simpang jalan, kawasan atau lokasi lain dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang akan dipasang fasilitas keselamatan jalan dan penerangan jalan umum;
16. Melakukan pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan dan penerangan jalan umum;
17. Melakukan upaya – upaya / inovasi memanfaatkan teknologi terbaru dalam rangka meningkatkan kinerja fasilitas keselamatan jalan dan penerangan jalan umum;
18. Menyiapkan bahan koordinasi permohonan bantuan anggaran / barang untuk pengadaan fasilitas keselamatan jalan dan penerangan jalan umum yang sumber anggarannya selain dari APBD Kabupaten;
19. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum;
20. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum secara berkala dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

23. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum memperjanjikan capaian kinerja triwulan IV terhadap Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	324 Unit
2.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	240 Unit
3.	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan
4	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 5.868.820.989,00	APBD
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 3.983.561.900,00	APBD
3.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 362.073.500,00	APBD
4.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 9.891.000,00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	324 Unit	324 Unit	324 Unit	100%
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	240 Unit	240 Unit	240 Unit	100%
3	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

1. Sasaran I : Tersedianya Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
Indikator I : Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	324 Unit	324 Unit	324 Unit	100%

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pada ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota telah disediakan dan terpasang perlengkapan jalan sesuai kebutuhan dan standar teknis, sehingga mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Persentase Capaian	Target Capaian Kegiatan
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	324 Unit	85,2%	100%

Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian target Indikator 1 adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Penerangan Jalan Umum di beberapa titik di jalan Kabupaten Luwu Timur serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Realisasi target kinerja yaitu Pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 214 Titik dan Pembangunan Stasiun Bus (Halte) sebanyak 1 Unit.

2. Sasaran II : Tersedianya Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

Indikator II : Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kegiatan perbaikan, penggantian, dan perawatan rutin terhadap perlengkapan jalan telah dilaksanakan sesuai rencana dan standar teknis, sehingga seluruh perlengkapan jalan dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan dalam mendukung keselamatan serta kelancaran lalu lintas.

No	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Persentase Capaian	Target Capaian Kegiatan
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	240 unit	100%	100%

Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian target Indikator 2 adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan dan pemeliharaan PJU yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Sasaran III : Terawasinya dan terkendalinya efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kab/Kota

Indikator III : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah seluruh kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan jalan dilaksanakan secara terpantau, terukur, dan dapat

dikendalikan, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Capaian sasaran pada triwulan IV adalah sebesar 100% di mana Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan sebanyak 16 Rekomendasi,

Adapun Laporan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Kerikil Berpasir Alami di Sungai Kalena Kelurahan Margalembu Kec. Mangkutana Kab. Luwu timur
2. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Batu Gunung Quarry Besar di Jalan Trans Desa Balaikembang Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur
3. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Kerikil Berpasir Alami Sungai Kalena desa Teromo Kec. Mangkutana.
4. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Mineral Logamm (Nikel) di Towuti dan wasuponda
5. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Kec. Malili
6. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pertambangan Golongan Batuan di desa Asuli Kec. Towuti
7. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Desa Maliwowo dan Desa Watangpanua Kec. Angkona
8. Rekomendasi andalalin Kegiatan Pembangunan Fasilitas Aspal Machine Plant (AMP) di desa Balambano Kec. Wasuponda
9. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pertambangan Mineral Non Logam (Batu Gamping) Desa Kawat Kec. Wasuponda
10. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Towuti Desa Wawondula Timampu Desa Matompi Kec. Towuti
11. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hual Nickel Kab. Luwu Timur
12. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pertambangan Go. Batuan Komoditas Tanah Urug Desa Lamaeto Kec. Angkona
13. Rekomondasi Andalalin Pembangunan Pasar Malindungi Desa Nikkel Kec. Nuha.
14. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Malili Daerah Malili Kab. Luwu Timur
15. Rekomendasi Andalalin kegiatan Pembangunan Mall Pelayanan Publik di jalan H.
16. Rekomendasi Andalalin Kegiatan Pembangunan Pasar Wasuponda.

Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian target Indikator 3 adalah :

a) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan dilakukan untuk mengawasi kemungkinan adanya pelanggaran gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, dan Pengendalian lalu lintas jalan raya melalui penggunaan sistem rambu, sinyal, dan marka serta memastikan bahwa perangkat pengatur lalu lintas menyampaikan makna yang jelas dan sederhana kepada pengendara sehingga terjadi keselamatan di ruang lalu lintas.

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	16 Laporan	133,3%

4. Sasaran IV : Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator IV : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah seluruh kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan jalan dilaksanakan secara terpantau, terukur, dan dapat dikendalikan, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Laporan yang dibuat sebagai instrument Koordinasi, Evaluasi, dan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian target Indikator 4 adalah :

a). Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, demi terciptanya sistem transportasi di wilayah perkotaan yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat.

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

B. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN III (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 30 SEPTEMBER 2025		%
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.224.347.389	10.224.347.389	6.764.272.845,94	66,16%	66,16%
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.852.382.889	9.852.382.889	6.412.983.316,94	65.09%	65.09%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.868.820.989	5.868.820.989	2.524.619.807,94	43.02%	43.02%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.983.561.900	3.983.561.900	3.888.363.509	97,61%	97,61%
2.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	371.964.500	371.964.500	351.289.529	94,44%	94,44%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	362.073.500	362.073.500	341.772.529	94.39%	94.39%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9.891.000	9.891.000	9.517.000	96.22%	96.22%

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 108,3 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 66,16 %, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	324 Unit	324 Unit	100%
2.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	240 Unit	240 Unit	100%
3.	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	16 Laporan	133,3 %
4	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	100%

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Akan dilakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan di jalan dan meningkatkan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
- Pemeliharaan penerangan jalan umum untuk terus diberi perhatian terutama penambahan anggaran pemeliharaan.

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas,
Fasilitas Keselamatan Jalan dan
Penerangan Jalan Umum



(UNTUNG PITOYO, SH)

LAPORAN TRIWULAN IV
PENGAWASAN LALU LINTAS DAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR



KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
7. Menyiapkan peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan standar teknis pengawasan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
8. Melakukan pemeriksaan kendaraan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah bidang lalu lintas, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala yang dilakukan oleh angkutan orang dan barang, sesuai dengan kewenangannya;
9. Melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas kendaraan serta melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
10. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang kelebihan muatan dan over dimensi (ODOL);
11. Menyiapkan bahan rekomendasi bengkel kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala;
12. Menyiapkan bahan rekomendasi izin perubahan bentuk / perubahan sifat kendaraan;
13. Menghimbau, mengawasi dan mengarahkan kendaraan wajib uji untuk masuk ke gedung pengujian berkala kendaraan;
14. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan baik dari segi regulasi, capaian kendaraan yang diuji dan Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
15. Melakukan penanganan urusan pemeriksaan penyebab kecelakaan lalu lintas jika dibutuhkan oleh instansi berwenang (Kepolisian, Pengadilan);
16. Melakukan pemberian layanan penderekan kendaraan bermotor;
17. Melakukan kegiatan koordinasi pengawasan dan penertiban usaha bengkel karoseri kendaraan bermotor;
18. Melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
19. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan rute perjalanan pada kegiatan – kegiatan tertentu atas permintaan instansi / lembaga lain atau masyarakat;
20. Menyusun peta potensi dan peta kinerja pengujian kendaraan bermotor;
21. Menyiapkan jadwal penugasan personil di lokasi yang membutuhkan pengaturan / pengawasan kendaraan;

22. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam hal melakukan tugas operasional pengawasan lalu lintas agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
23. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
24. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor memeperjanjikan capaian kinerja Triwulan III terhadap Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1.871 unit
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 113.000.000,00	APBD
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 253.000.000.00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target 2025	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terdaftar nya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan	1871 unit	1871 unit	1871 unit	100 %
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100 %

Sasaran 1 : Terdaftar nya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator 1 : Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah seluruh kendaraan bermotor yang secara ketentuan diwajibkan menjalani uji berkala (uji KIR) telah tercatat secara resmi dalam sistem pengujian kendaraan bermotor pada instansi yang berwenang. Semakin banyak Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar, maka cakupan pelayanan pengujian kendaraan bermotor semakin meningkat, yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala serta terjaminnya kelaikan teknis kendaraan yang beroperasi di jalan.

Kegiatan yang menunjang pencapaian target Sasaran adalah

a) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran 1 dan Indikator 1:

a) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Sub kegiatan ini adalah sub kegiatan yang mengakomodir kegiatan pengujian berkala kendaraan wajib uji yang dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap 1 unit kendaraan wajib uji. Selama triwulan IV mulai bulan Oktober sampai bulan

Desember tidak ada pengujian hanya dilakukan registrasi kendaraan wajib uji kepada 172 unit kendaraan yang akan melakukan numpang uji di Kabupaten lain.

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI I IV	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdaftar Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1871 Unit	1871 Unit	1871 Unit	100 %

Sasaran 2 : Terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian

Indikator 2 : Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa seluruh fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor (uji KIR) berada dalam keadaan laik fungsi, terawat, dan sesuai dengan standar teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin baik Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka kualitas dan keandalan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor semakin meningkat, yang berdampak pada terjaminnya kelaikan teknis kendaraan, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta mutu pelayanan publik yang lebih optimal.

Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran 1 dan Indikator 1:

a). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan terhadap 8 unit alat pengujian untuk mengkalibrasi menguji keakurasian alat yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga dilakukan penggantian suku cadang pada alat yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik. Alat pengujian yang akurat dapat memastikan kendaraan yang diuji KIR telah aman, nyaman dan laik jalan. Realisasi keuangan sebesar belum ada karena belum dilakukan Pemeliharaan dan akan dilaksanakan pada triwulan 4.

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit	11 Unit	11 Unit	100%

Telah dilaksanakan Proses akreditasi unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada bulan Desember 2025 oleh direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Berita acara hasil Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : 73/UBKP-AKR/XII/2025, UPUBKB Dinas Perhubungan Luwu Timur memperoleh Akreditasi B dengan beberapa catatan, antara lain :

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor
- b. Belum lengkapnya peralatan uji, yaitu Sound Level Meter, genset dan alat pemadam kebakaran
- c. Adanya kerusakan pada saat uji Side Slip Tester
- d. Perlunya pemasangan rambu pendahulu petunjuk arah menuju UPUBKB Dinas perhubungan Kabupaten Luwu Timur

Terhadap kekurangan tersebut, telah disusun Action Plan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 500.11/1359/Dishub tentang penyampaian Komitmen Rencana aksi, yang menyatakan bahwa pemenuhan seluruh kekurangan dimaksud akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu empat (4) tahun.

B. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	366.000.000	366.000.000	230.379.720	73,99%	73,99%
1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	113.000.000	113.000.000	45.442.735	40,21%	40,21%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253.000.000	253.000.000	225.352.000	89,07%	89,07%

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Perhubungan Darat triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 73,99 %, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1.871 unit	1.871 unit	100%
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit	11 unit	100%

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Akan dilakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan di jalan agar dapat untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang belum melakukan uji KIR
- Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor akan dilakukan lebih maksimal

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Seksi Pengawasan Lalu
Lintas dan Pengujian Kendaraan
Bermotor



NAWIR, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan fisik pada program/kegiatan Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti pada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2026, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan & Penerangan Jalan Umum
 - Melakukan survey jumlah volume lalu lintas yang melalui ruas jalan Kabupaten Luwu Timur
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan terutama Traffic Light, Warning Light dan PJU.
 - Melengkapi data terkait kebutuhan fasilitas keselamatan jalan
 - Percepatan realisasi anggaran untuk setiap kegiatan
- b) Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas & Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Melengkapi data jumlah kendaraan wajib uji
 - Melaporkan jumlah kendaraan yang telah melakukan pengujian
 - Melengkapi data jumlah kecelakaan kendaraan wajib uji

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan.

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang Lalu Lintas &
Keselamatan Jalan


JAMALUDDIN A.S.Sos
NIP. 19690407 198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-1-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

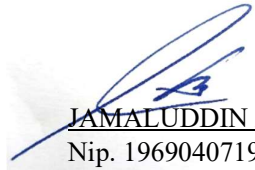
Nama : JAMALUDDIN A, S.Sos
NIP : 19690407 198903 1 014
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas & Keselamatan Jalan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : NAWIR,SH
NIP : 197511012000051001
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025.

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang,


JAMALUDDIN A, S.Sos
Nip. 19690407198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-1-2026)
bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDDIN A, S.Sos
NIP : 19690407 198903 1 014
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas & Keselamatan Jalan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : UNTUNG PITOYO, SH
NIP : 19750705 200502 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas,
Fasilitas Keselamatan Jalan & Penerangan Jalan Umum

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada
Triwulan IV Tahun 2025.

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang,

JAMALUDDIN A, S.Sos
Nip. 19690407198903 1 014

FORMAT DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
TAHUN 2025

No	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan lalu lintas	
			2024	2025
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	274 KASUS	254 KASUS
2	Kerugian Materiil	Rupiah	RP. 337.850.000,-	RP. 353.850.000,-
3	Jumlah Korban	Orang	492 KORBAN	459 KORBAN
4	Meninggal	Orang	51 ORANG	44 ORANG
5	Luka Berat	Orang	11 ORANG	4 ORANG
6	Luka Ringan	Orang	430 ORANG	411 ORANG

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUWU TIMUR POLDA SULSEL
KASAT LANTAS

MENGETAHUI :

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80030811

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR LUWUTIMUR

Jl. Andi Djemma No.01 Malli 92981

FORMAT DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
TAHUN 2025

No	Uraian	Januari 2025		Februari 2025		Maret 2025		April 2025		Mei 2025		Juni 2025		Keterangan
		Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	
1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	2	2	1	3	4	5	6	5	1	2	2	3	
2	Jumlah Kecelakaan Faktor Kendaraan	3		1	3	4	5	6	5	8		8		
3	Jumlah Kecelakaan Faktor Manusia		1							3		2		
4	Jumlah Kecelakaan Faktor Lingkungan													
5	Jumlah Kecelakaan Faktor Jalan													

No	Uraian	JULI 2025		Agustus 2025		September 2025		Oktober 2025		November 2025		Desember 2025		Keterangan
		ANGKUTAN PENUMPANG UMUM	ANGKUTAN BARANG	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	Angkutan Penumpang Umum	Angkutan Barang	
1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	4	2	4	2	3	3	4	3	2	2	2	5	
2	Jumlah Kecelakaan Faktor Kendaraan	6		8		7		6		7		6		
3	Jumlah Kecelakaan Faktor Manusia	1		3		1		3		1		1		
4	Jumlah Kecelakaan Faktor Lingkungan													
5	Jumlah Kecelakaan Faktor Jalan													

MENGETAHUI :

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUWU TIMUR POLDA SULSEL
KASAT LANTAS


A. N. KUSNAWAN, S.E
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80030811



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

Malili, 9 Januari 2026

Nomor : 500.11/ 29 /Dishub/2025
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat

- Yth. 1. Sekretaris Dinas Perhubungan
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
3. Kepala seksi Pengawasan Lalu Lintas dan
Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas
Keselamatan Jalan dan Penerangan Jalan Umum
6. Staf Bidang Lalin dan Keselamatan Jalan

di-
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2025, maka akan dilakukan Rapat evaluasi internal terhadap capaian program dan kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Pukul : 14.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT
Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b
NIP : 19760923 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta No. TELP. (0474) 321-429

MALILI, 92981

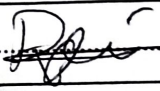
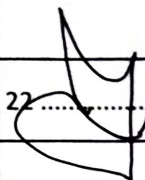
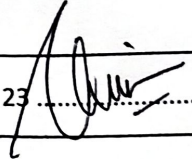
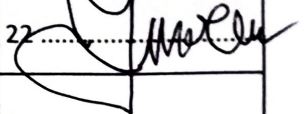
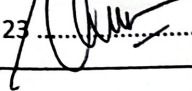
DAFTAR HADIR

AGENDA RAPAT : Rapat Evaluasi Internal

TANGGAL : 12 Januari 2026

TEMPAT : Dinas Perhubungan

NO.	NAMA	JABATAN	TTD.
1	Jamaluddin A	Kabid Lalin	1.
2	Nziwip		2.
3	UNTUNG PIROYO		3.
4	ANUGRAH TRISAKTI PUTRA	Staf	4.
5	Ali Laid	Staf	5.
6	Arnas Mustakin		6.
7	Hidayat	STAF	7.
8	Rugayyah		8.
9	Wahyu prabowo		9.
10	Wahyu tahir		10.
11	Ade sapura		11.
12	maman mard		12.
13	ZULIZI INSANI	STAF	13.
14	I Dewa Cete Adi	staf	14.
15	Riswandi	staf	15.
16	Risaldi		16.
17	IRWAN. THAHIR		17.
18	SUKMA		18.
19	Eka Rana dhanu		19.
20	RIZKI TIA STOFFI		20.

NO.	NAMA	JABATAN	TTD.	
21	Rahmad.		21 	
22	Imron.		22 	22 
23	DARLIN		23 	
24				24

Malili,

2025

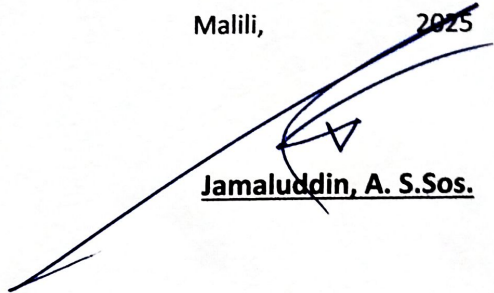

Jamaluddin, A. S.Sos.

FOTO KEGIATAN



LAPORAN TRIWULAN IV
BIDANG ANGKUTAN JALAN



KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan stratejik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Bidang Angkutan Jalan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang terminal dan perparkiran;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 202

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Bidang Angkutan Jalan memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV terhadap Kepala Dinas Perhubungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,53	
1.1	Beroperasinya Terminal Type C yang sesuai standar	Persentase terminal yang beroperasi sesuai standar	50%	
1.2	Meningkatnya kualitas layanan parkir	Persentase penyelenggaraan fasilitas parkir	46,67%	
1.3	Meningkatnya layanan angkutan umum dan angkutan khusus	Persentase orang yang terlayani angkutan	29,22%	
1.4	Beroperasinya angkutan penumpang umum yang memiliki trayek	persentase angkutan yang memiliki ijin trayek	1,08%	
2	Tersedianya dokumen perencanaan Bandar Udara yang telah disetujui	Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara	40%	
2.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandar Udara	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bandara	40%	

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 20.803.826.572,00	APBD

1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 4.019.559.533,00	APBD
2.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 29.769.200,00	APBD
3.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.127.783.000,00	APBD
4.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36.367.450,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Penerbangan	Rp 932.411.000,00	APBD
1.	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Rp 932.411.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,53%	0	0	

Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat

Indikator : Konektivitas Darat

Formulasi : Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)

Meningkatkan pelayanan melalui layanan transportasi darat adalah upaya terencana dan terukur untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan transportasi darat agar semakin aman, nyaman, terjangkau, andal, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi. Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat didukung dengan Pembangunan Terminal Malili, Pemasangan Penerangan Jalan Umum, Pembangunan Halte Bus Sekolah, dan Pengadaan Bus Sekolah, selain itu rutin dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Perhubungan agar dapat berfungsi dengan baik.

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan program yang dilaksanakan oleh Bidang Angkutan Jalan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. melalui pembangunan sarana dan prasarana LLAJ berupa Pembangunan Terminal Malili, Pemasangan Penerangan Jalan Umum, Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas, selain itu rutin dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Perhubungan agar dapat berfungsi dengan baik.

Capaian sasaran ini didukung oleh 4 kegiatan dengan capaian sebagai berikut

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Taregt TW IV 2025	Realisasi 2025	Capaian
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	1	1	100%

Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan melalui Pemeliharaan Terminal yang ada dan Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge, Dengan terbangunnya beberapa fasilitas utama di Terminal maka diharapkan aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal. Sehingga jumlah orang atau masyarakat yang menggunakan fasilitas Terminal semakin meningkat setiap tahunnya.

Kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pembangunan Terminal yaitu Terminal Malili.

Adapun item pekerjaan yang telah dilaksanakan di Terminal Malili adalah lanjutan Pembangunan Bangunan Utama serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan di dalam Terminal dan penataan lahan parkir terminal.

b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Melalui pengelolaan terminal juga dilaksanakan pemeliharaan rutin terhadap 3 unit terminal. Pemeliharaan dilakukan terhadap Terminal Malili, Terminal Tarengge dan Terminal Wawondula secara berkala, pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan terhadap keutuhan dan kebersihan bangunan terminal, pemeliharaan rambu, marka dan papan informasi, pemeliharaan saluran-saluran air, pemeliharaan instalasi listrik dan lampu penerangan dan fasilitas pendukung terminal lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemilik kendaraan merasa aman dan nyaman, menggunakan fasilitas terminal, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menunggu kendaraan di luar area terminal begitupun pemilik kendaraan tidak menunggu penumpang di luar area terminal.

2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	100%

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Titik parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sampai tahun 2025 sebanyak 15 titik yaitu Parkir Pujasera Tomoni, Pasar Tomoni, Pasar Mangkutana, Pasar Wotu, pasar Lambarese, Pasar Kalaena, Pasar Tampinna, Pasar Lakawali, Pujasera Malili, Pasar Malili, Pasar Wasuponda, Pasar Towuti, Terminal Wawondula, Terminal Malili dan Terminal Tarengge.

3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV	Capaian
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30	30	30	100%

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Berjumlah 30 Unit. Telah bertambah sejumlah 2 unit melalui pengadaan pada Perubahan Anggaran Triwulan ke IV. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan sekolah maka dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 28

unit bus sekolah melalui Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Capaian
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	100%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

bertujuan untuk mengupayakan penurunan angka kecelakaan dan meningkatkan persentase kendaraan penumpang umum atau angkutan wajib uji yang laik jalan. Sasaran kegiatan ini adalah pemilik dan pengguna kendaraan wajib uji yaitu penumpang umum orang dan barang.

Rasio izin trayek adalah perhitungan yang di dapat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.803.826.572	20.803.826.572	4.412.957.302,28	21,21%	21,21%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4.019.559.533	4.019.559.533	1.655.120.522,28	41,18%	41,18%
	Pembangunan Gedung Terminal	3.609.425.977	3.609.425.977	1.270.420.109,74	35,20%	35,20%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	410.133.556	410.133.556	384.700.412,54	93,80%	93,80%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29.769.200	29.769.200	15.589.097	52,37%	52,37%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29.769.200	29.769.200	15.589.097	52,37%	52,37%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.127.783.000	6.127.783.000	2.709.020.435	44,21%	44,21%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.127.783.000	6.127.783.000	2.709.020.435	44,21%	44,21%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.367.450	36.367.450	33.227.248	91,37%	91,37%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36.367.450	36.367.450	33.227.248	91,37%	91,37%

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Angkutan Jalan Triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100 % dan akuntabilitas keuangan terhadap Triwulan IV mencapai 21,21%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Bidang Angkutan Jalan.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama Triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Akan dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung terutama Pembangunan Terminal Malili dan Pengadaan Bus Sekolah
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin trayek untuk angkutan desa

Malili, 13 Januari 2026

Kabid Angkutan Jalan



ARHAM ALQAF, S.IP, M.Tr.A.P

LAPORAN TRIWULAN IV
KEPALA SEKSI TERMINAL DAN PERPARKIRAN



KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan stratejik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Terminal dan Perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Terminal dan Perparkiran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Terminal dan Perparkiran;

7. Menyiapkan peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan standar teknis mengenai terminal dan perparkiran yang menjadi kewenangan kabupaten;
8. Melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pengendalian operasional dan pemeliharaan terminal dan rest area (Tempat Istirahat dan Pelayanan);
9. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data / informasi kinerja terminal dan rest area setiap bulan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
10. Menyusun rencana pengembangan fasilitas terminal dan rest area;
11. Melakukan pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir / istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal dan rest area;
12. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan tempat usaha (kios), papan reklame dan penyewaan lahan di dalam wilayah terminal dan rest area;
13. Melakukan upaya – upaya mendukung tercipta ketertiban lalu lintas dan kebersihan di lingkungan terminal dan rest area;
14. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal serta menyajikan alternatif pemecahannya;
15. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, penetapan, teknis pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
16. Melakukan penyediaan dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
17. Menyusun rekomendasi teknis perizinan pengelolaan parkir oleh pihak swasta;
18. Mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pihak swasta;
19. Menyiapkan jadwal penugasan personil di setiap terminal;
20. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam hal melakukan tugas operasional terminal dan perparkiran agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
21. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
22. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Terminal dan Perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Terminal dan Perparkiran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Kepala Bidang Angkutan Jalan

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 unit
2.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 unit
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Gedung Terminal	Rp 3.609.425.977,00	APBD
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 410.133.556,00	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 29.769.200,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terangkutnya penumpang angkutan umum melalui terminal	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal	233.076 orang	58.269	42.545	73,01%
2	Tersedianya Titik Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan	15 titik	15	15	100%

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terbangunnya terminal	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1	1	1	100%
2	Tersedianya terminal yang terawat dan berfungsi dengan baik	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 unit	3	3	100%

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan melalui Pemeliharaan Terminal yang ada dan rencana akan dilakukan lanjutan Pembangunan Terminal Malili, Dengan terbangunnya beberapa fasilitas utama di Terminal Malili maka diharapkan aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas manikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal. Sehingga jumlah orang atau masyarakat yang menggunakan fasilitas Terminal semakin meningkat setiap tahunnya.

a) Pembangunan Terminal yaitu Pembangunan Terminal Malili yang telah dilaksanakan pada triwulan IV

b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Melalui pengelolaan terminal juga dilaksanakan pemeliharaan rutin terhadap 3 unit terminal. Pemeliharaan dilakukan terhadap Terminal Malili, Terminal Tarengge dan Terminal Wawondula secara berkala, pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan terhadap keutuhan dan kebersihan bangunan terminal, pemeliharaan rambu, marka dan papan informasi, pemeliharaan saluran-saluran air, pemeliharaan instalasi listrik dan lampu penerangan dan fasilitas pendukung terminal lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemilik kendaraan merasa aman dan nyaman, menggunakan fasilitas terminal, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menunggu kendaraan di luar area terminal begitupun pemilik kendaraan tidak menunggu penumpang di luar area terminal.

2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya pengawasan terhadap titik parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	4	4	100%

Penertiban dan penyediaan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Titik parkir yang dikelola Dinas Perhubungan samapai tahun 2025 sebanyak 15 titik yaitu Parkir Pujasera Tomoni, Pasar Tomoni, Pasar Mangkutana, Pasar Wotu, pasar Lambarese, Pasar Kalaena, Pasar Tampinna, Pasar Lakawali, Pujasera Malili, Pasar Malili, Pasar Wasuponda, Pasar Towuti, Terminal Wawondula, Terminal Malili dan Terminal Tarengge.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 30 SEPTEMBER 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah	4.049.328.733	4.049.328.733	1.670.709.619,28	41,26%	41,26%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4.019.559.533	4.019.559.533	1.655.120.522,28	41,18%	41,18%
	Pembangunan Gedung Terminal	3.609.425.977	3.609.425.977	1.270.420.109,74	35,20%	35,20%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	410.133.556	410.133.556	384.700.412,54	93,80%	93,80%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29.769.200	29.769.200	15.589.097,00	52,37%	52,37%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29.769.200	29.769.200	15.589.097,00	52,37%	52,37%

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Perhubungan Darat Triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 41,26%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Seksi Terminal dan Perparkiran.

2. SARAN

Dari berberapa permasalahan yang dihadapi selama Triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Sebagaimana diatur Permenhub No. 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal, terbagi atas tipe A,B dan C. Untuk Terminal A melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dikelola oleh Kemenhub, tipe B untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan tipe C Angkutan Kota Dalam Kabupaten/ Angkutan Desa (ANDES) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, tentunya kewenangan kabupaten terbatas pada penyelenggaraan terminal tipe C yang hanya melakukan pelayanan pada angkutan desa (ANDES), oleh sebab itu maka Dishub Luwu Timur sedang Merancang program kerjasama penyelenggaraan terminal dengan Balai Transportasi Darat Kelas II Sul-Sel dan Dinas Perhubungan Provinsi Sul-Sel, agar Terminal Tarengge dapat Berfungsi sebagai Terminal Tipe A dan B. sehingga Bus AKAP dan AKDP dapat menaikkan dan menurunkan penumpang diterminal tersebut.
- Peningkatan Pengawasan Angkutan karena Jumlah Kendaraan Umum yang memanfaatkan terminal berkurang, sebagai akibat banyaknya plat hitam yang beroperasi sebagai mobil angkutan umum.
- Penetapan anggaran untuk pembangunan Terminal agar dapat terbangun 100% dan bisa berfungsi secara maksimal.

Malili, 13 Januari 2026

Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran


RUSTAM, S. AN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARHAM ALQAF, S.IP.,M.Tr.A.P

NIP : 19760427 199603 1 003

Jabatan : Kabid Angkutan Jalan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

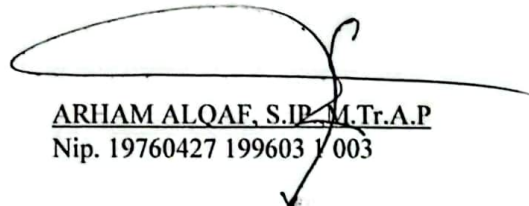
Nama : RUSTAM, S.AN

NIP : 19800201 200312 1 005

Jabatan : Kasi Terminal dan Perparkiran

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan



ARHAM ALQAF, S.IP., M.Tr.A.P
Nip. 19760427 199603 1 003

LAPORAN TRIWULAN IV
KEPALA SEKSI ANGKUTAN



KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Seksi Angkutan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Angkutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan sub kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Angkutan;
7. Menyiapkan peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan standar teknis mengenai angkutan orang dan barang;

8. Menyusun rencana umum jaringan trayek kabupaten untuk angkutan pedesaan dan angkutan kota;
9. Menyusun bahan penetapan trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota;
10. Menyusun bahan pertimbangan perijinan trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota;
11. Menyusun bahan rekomendasi perijinan angkutan AKDP/AKAP;
12. Menyusun bahan izin usaha angkutan barang, angkutan pariwisata dan angkutan bus sekolah;
13. Menyusun perhitungan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan;
14. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan;
15. Mengoperasikan dan memelihara kendaraan bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
16. Memantau dan mengevaluasi standar layanan dan trayek bus sekolah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
17. Memantau dan mengevaluasi secara berkala sikap dan perilaku para pengemudi dalam mengoperasikan bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, termasuk kedisiplinan sopir ketika mengantar / menjemput siswa;
18. Menyusun bahan koordinasi permohonan bantuan anggaran atau barang untuk penyediaan kendaraan angkutan orang atau barang yang sumber anggarannya selain dari APBD Kabupaten;
19. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
20. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Angkutan secara berkala dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Seksi Angkutan memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Kepala Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RP. 6.127.783.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 36.367.450,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV TA 2025	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya sarana angkutan umum untuk angkutan orang yang disediakan oleh Pemda	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	2 Unit	2 Unit	100%
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%

1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV 2025	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya angkutan yang diusahakan oleh Pemda	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 unit	30	30	100%

Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya, selama Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 98.010 siswa dan siswi SMP dan SMA Kabupaten Luwu Timur diangkut oleh Bus Sekolah setiap hari. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan sekolah maka dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 28 unit bus sekolah melalui Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Penambahan 2 unit bus sekolah telah dilaksanakan melalui Pengadaan pada Triwulan IV.

2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	100%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengupayakan penurunan angka kecelakaan dan meningkatkan persentase kendaraan penumpang umum atau angkutan wajib uji yang laik jalan. Sasaran kegiatan ini adalah pemilik dan pengguna kendaraan wajib uji yaitu penumpang umum orang dan barang.

Rasio izin trayek adalah perhitungan yang di dapat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan ke IV rasio ijin trayek tidak tercapai karena tidak ada unit kendaraan yang mengurus izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 30 30 SEPTEMBER 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah	6.164.150.450	6.164.150.450	2.742.247.683	44,62%	44,62%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.127.783.000	6.127.783.000	2.709.020.435	44,21%	44,21%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.127.783.000	6.127.783.000	2.709.020.435	44,21%	44,21%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.367.450	36.367.450	33.227.248	91,37%	91,37%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36.367.450	36.367.450	33.227.248	91,37%	91,37%

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Angkutan Jalan Triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100% dan akuntabilitas keuangan mencapai 44,62%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Seksi Angkutan.

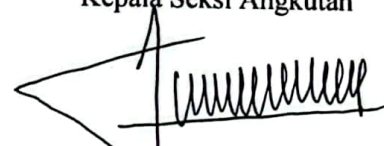
2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama Triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Jumlah Bus sekolah yang ada belum dapat mengakomodir seluruh siswa SMP dan SMA yang ada di kabupaten Luwu Timur sehingga diharapkan prioritas penetapan anggaran untuk pembelian Bus sekolah.
- Beberapa Bus Sekolah yang saat ini beroperasi telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, kondisi teknis mengalami penurunan sehingga membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif.
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin trayek untuk angkutan desa.

Malili, 13 Januari 2026

Kepala Seksi Angkutan



EDISUKMA, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARHAM ALQAF, S.IP.,M.Tr.A.P

NIP : 19760427 199603 1 003

Jabatan : Kabid Angkutan Jalan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

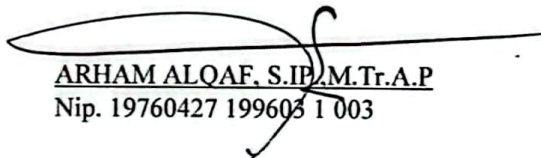
Nama : EDI SUKMA, S.IP

NIP : 19870312 200701 1 001

Jabatan : Kasi Angkutan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan


ARHAM ALQAF, S.IP.,M.Tr.A.P
Nip. 19760427 199603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Soekarno-Hatta Malili 92981
Tlp/Fax (0474) 321429
Email : dishub.luwutimurkab@gmail.com
Website : dishubluwutimurkab.go.id

Malili, 11 Januari 2026

Nomor : 500.11/81/DISHUB/2026
Sifat : -
Perihal : **UNDANGAN**

K e p a d a

- Yth. 1. Sekretariat Dinas Perhubunga
2. Kepala Bidang Angkutan Jalan
3. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran
4. Kepala Seksi Angkutan
5. Staf Bidang Angkutan Jalan

Di,-

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2025, maka akan dilakukan rapat evaluasi internal terhadap capaian program dan kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Januari 2026

Waktu : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas,



Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT

Pangkat : Pembina Tk.1, IV/b

Nip : 19760923 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Soekarno – Hatta No. TELP. (0474) 321-429
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

AGENDA RAPAT : RAPAT INTERNAL BIDANG ANGKUTAN
TANGGAL : 12 JANUARI 2026
TEMPAT : AULA RAPAT DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA	JABATAN	TTD.
1			1
2			2
3	Arhan	Kabid	3
4	Edi Subma	Kasi Angkutan	4
5	RUSTAM	Kasi Terminal & Repurusa	5
6	Eni Dwi Kurniawati	Staf	6
7	Rohmat Amin	Staf	7
8	Mursudi	Staf	8
9	ALI GUNTUR	Staf	9
10	Mohammad Rezky	STAFF	10
11	Akhriani Achmad	Staf	11
12	RISMAWATI	Staf	12
13	IDA WETI	Staf	13
14	Fati' Salam	Staf	14
15	Am Mujanidah D	Staf	15
16	SLHSL	Staf	16
17	RIDWAN RAMPE	Staf	17
18	ABDUL KHOLIK	Staf	18
19			19
20			20

Malili,

2025

.....

FOTO KEGIATAN



LAPORAN KEGIATAN BIDANG PELAYARAN

TRIWULAN IV

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Bidang Pelayaran adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann.

C. FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang terminal dan perparkiran;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Bidang Pelayaran memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Kepala Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Target TA 2025	Target TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi danau	Konektivitas Danau	0,67	0,67
1.1	Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil	11,11%	11,11%
1.2	Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan	35,82	35,82

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 782.828.500,00	APBD
1.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 659.832.000,00	APBD
2.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 122.996.500,00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW 4	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi danau	Konektivitas Danau	0,67	0,67	0,67	100%
		Persentase kepemilikan pas kecil	11,11%	11,11%	11,11%	100%
		Nilai SPM Kepelabuhanan	35,82	35,82	35,82	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran						100%

- Konektivitas Danau (Rasio)
 =Jumlah rencana trayek yang dilayani*jumlah bobot trayek /jumlah total rencana trayek
 = $8 \times 1/12 = 0,67$
- Persentase kepemilikan pas kecil (%)
 =Jumlah kapal yang memiliki pas kecil / jumlah kapal GT<7
 = $50/450 = 11,11\%$
- Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)
 = Mengikuti data tahun 2024 (karena belum ada SPM Kepelabuhanan tahun 2025). SPM Kepelabuhanan 2024 adalah 35,82

Program Pengelolaan Pelayaran didukung oleh 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target TA 2025	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil (%)	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan. Pada triwulan 4 tahun 2025 jumlah kapal yang telah memiliki pas kecil sebanyak 50 unit dari target 450 unit atau sebesar 11,11% hal ini terjadi karena adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Kantor Syahbandar sehingga tidak dapat melakukan pengukuran kapal terhadap kapal yang telah difasilitasi pengurusan ijinnya.

2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan (Nilai)	35,82	35,82	35,82	100,00 %

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.

Pada tahun 2025 jumlah penumpang dan barang yang melalui Dermaga meningkat karena pada lintasan dermaga Sorowako ke

dermaga Nuha dan lintasan dermaga Timampu ke dermaga Tokalimbo dilayani kapal ferry KMP Opudi dan KMP Pangkilang yang memiliki standar keselamatan dan kelaiklautan kapal, memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang prima serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi danau Matano dan danau Towuti yang menyebabkan meningkatnya penumpang pada penyeberangan danau Matano dan danau Towuti

- a) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan setiap tahun terhadap dermaga penyeberangan di Kabupaten Luwu Timur secara rutin sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2025 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 92 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.

A. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	782.828.500	782.828.500	646.321.686	82,56%	82,56%
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.996.500	122.996.500	93.723.726		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	122.996.500	122.996.500	93.723.726	76,20%	76,20%
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	659.832.000	659.832.000	552.597.960		
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144.000.000	144.000.000	87.347.300	60,66%	60,66%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	515.832.000	515.832.000	465.250.660	90,19%	90,19%

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan triwulan IV tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata - rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100,00% dan akuntabilitas keuangan mencapai 82,56%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Bidang Pelayaran.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan
- Aparatur Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang Pelayaran


USMAN JUNAEDI, ST
NIP. 19680105 200604 1 024

LAPORAN KEGIATAN SEKSI KEPELABUHANAN

TRIWULAN IV

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Seksi Kepelabuhanan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kepelabuhanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Kepelabuhanan;
7. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data / informasi kinerja transportasi laut setiap bulan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
8. Mengupayakan dan mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan mendukung pengembangan kawasan pelabuhan;
9. Melakukan pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan fasilitas dan pemungutan retribusi di jalan masuk menuju Pelabuhan Laut Lampia (Kawasan Pelabuhan Laut Lampia) sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah;
10. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan kapal milik Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;
11. Menyusun rencana pemanfaatan kapal kapal milik Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur agar dapat mendukung program kerja pemerintah daerah dan mendapatkan pendapatan asli daerah;
12. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pertimbangan teknis untuk rekomendasi pembangunan pelabuhan;
13. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan secara berkala dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Seksi Kepelabuhanan memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Kepala Bidang Pelayaran

No.	Sasaran	Indikator	Target TA 2025	Target TW IV
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil	11,11%	11,11%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 122.996.500,00	APBD

BAB III

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil	11,11%	11,11%	11,11%	100%
Rata-rata capaian kinerja kegiatan						100,00%

A. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA2025	TARGET TW 4	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengawasan terhadap kapal GT < 7	Persentase kepemilikan pas kecil	11,11%	11,11%	11,11%	100%

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukurkan kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan. Pada triwulan 4 tahun 2025 jumlah kapal yang telah memiliki fas kecil sebanyak 50 unit dari target 450 unit .

B. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DeESEMBER 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH	122.996.500	122.966.500	93.723.726	76,20%	76,20%
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.996.500	122.966.500	93.723.726		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	122.996.500	122.966.500	93.723.726	76,20%	76,20%

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Seksi Kepelabuhanan Bidang Pelayaran triwulan III tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata - rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100,00 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 76,20%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Seksi Kepelabuhanan.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Pada triwulan 4 tahun 2025 jumlah kapal yang telah memiliki pas kecil sebanyak 50 unit dari target 50 unit.
- Pemilik kapal yang kurang aktif dan cenderung kurang aktif melakukan pengurusan surat izin berlayar

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Seksi Kepelabuhanan



THOMAS AGUSTINUS. S.Hut
NIP. 19830808 200502 1 001

**LAPORAN KEGIATAN
SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN
RAKYAT & ANGKUTAN SUNGAI
DANAU & PENYEBERANGAN**

TRIWULAN IV

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat & Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Transportasi Danau dan Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Transportasi Danau dan Sungai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Transportasi Danau dan Sungai untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Seksi Transportasi Danau dan Sungai;
7. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data / informasi kinerja transportasi danau dan sungai setiap bulan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
8. Menyiapkan bahan penyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (dermaga dan kapal) di danau dan sungai;
9. Menyiapkan pertimbangan teknis rekomendasi pembangunan dermaga dan galangan kapal di danau dan di sungai;
10. Menyusun peta potensi dan peta kinerja transportasi di danau dan sungai dalam bentuk tabel, grafik atau jaringan;
11. Melakukan pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan dermaga penyeberangan di danau dan di sungai yang menjadi kewenangannya;
12. Melakukan pengawasan pemungutan retribusi di dermaga yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan daerah yang berlaku;
13. Melakukan upaya - upaya mendukung tercipta ketertiban lalu lintas dan kebersihan di lingkungan dermaga;
14. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan dermaga serta menyajikan alternatif pemecahannya;
15. Mendistribusikan tugas kepada bawahan melakukan tugas operasional dermaga yang menjadi kewenangannya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

17. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Transportasi Danau dan Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Transportasi Danau dan Sungai secara berkala, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat & Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Kepala Bidang Pelayaran

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan	35,82	35,82

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 515.832.000,00	APBD
2.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 144.000.000,00	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)*100%
1	Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan	35,82	35,82	35,82	100,00%
Rata-rata capaian kinerja kegiatan						100,00%

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

N O	SASARAN SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW 4	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Beroperasinya Pelabuhan yang memenuhi SPM	Nilai SPM Kepelabuhanan	35,82	35,82	35,82	100,00%

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.

Pada tahun 2025 jumlah penumpang dan barang yang melalui Dermaga meningkat karena pada lintasan dermaga Sorowako ke dermaga Nuha dan lintasan dermaga Timampu ke dermaga Tokalimbo dilayani kapal ferry KMP Opudi dan KMP Pangkilang yang memiliki standar keselamatan dan kelaiklautan kapal, memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang prima serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi danau Matano dan danau Towuti yang menyebabkan meningkatnya penumpang pada penyeberangan danau Matano dan danau Towuti

- a) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan setiap tahun terhadap dermaga penyeberangan di Kabupaten Luwu Timur secara rutin sesuai dengan kebutuhannya.

- b) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.

B. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN Iv (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		(%)
				(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)*100%	(8) = (6)/(4)*100%
	JUMLAH	659.832.000	659.832.000	552.597.960	83,75%	83,75%
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	659.832.000	659.832.000	552.597.960	83,75%	83,75%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144.000.000	144.000.000	87.347.300	60,66%	60,66%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	515.832.000	515.832.000	465.250.6600	90,19%	90,19%

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bidang Perhubungan Seksi Angkutan Pelayaran & ASDP Dinas Perhubungan triwulan III tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa nilai rata - rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100,00 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 83,75%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat & Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan III tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan
- Aparatur Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Seksi Angkutan Pelayaran
Rakyat & Angkutan Sungai Danau
& Penyeberangan



ATRIS,SH
NIP. 19680818 200701 1 040

**PELAKSANAAN
RAPAT EVALUASI INTERNAL**

TRIWULAN IV

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan fisik pada program/kegiatan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan triwulan 4 Tahun 2025, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasi Kepelabuhanan


- Melakukan Fasilitasi pengurusan dokumen pas kecil kapal
- Pengawasan secara rutin kegiatan pengoperasian pelabuhan lampia

2. Kasi Angkutan Pelayaran Rakyat & Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan

- Melengkapi Data jumlah kapal, jumlah penumpang dan jumlah barang yang melalui dermaga
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait rencana pembangunan ruang tunggu di Dermaga Soroako
- Tetap melakukan fasilitasi pengurusan sertifikat kapal terhadap kapal yang beroperasi di Danau

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan.

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang Pelayaran


USMAN JUNAEDI, ST
Nip. 19680105 200604 1 024

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429

MALILI, 92981

DOKUMENTASI RAPAT





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429

MALILI, 92981

Malili, 10 Januari 2026

Nomor : 500.11/31/Dishub/2026

Lampiran :

Perihal : Undangan Rapat

Yth. 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan

2. Kepala Seksi ASDP

3. Staf Bidang Pelayaran

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan triwulan 4 tahun anggaran 2025, maka akan dilakukan rapat evaluasi internal terhadap capaian program dan kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Pukul : 08.00 Wita - selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan

Demikian Disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pelayaran,

Usman Junaedi, ST
NIP. 19680105 200604 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429

MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

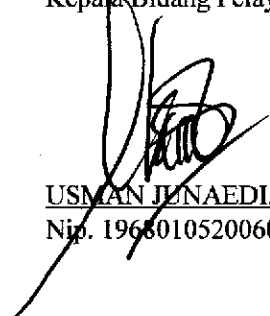
Nama : USMAN JUNAEDI, ST
NIP : 19680105 200604 1 024
Jabatan : Kepala Bidang Pelayaran

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : ATRIS, SH
NIP : 19680818 200701 1 040
Jabatan : Kasi Angkutan Pelayaran Rakyat & Angkutan Sungai
Danau & Penyeberangan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV tahun anggaran 2025

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang Pelayaran


USMAN JUNAEDI, ST
Nip. 196801052006041024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429

MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN JUNAEDI, ST

NIP : 19680105 200604 1 024

Jabatan : Kepala Bidang Pelayaran

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

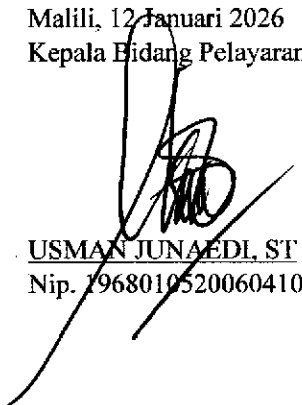
Nama : THOMAS AGUSTINUS, S.Hut

NIP : 19830808 200502 1 001

Jabatan : Kasi Kepelabuhanan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV tahun anggaran 2025

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Bidang Pelayaran


USMAN JUNAEDI, ST
Nip. 196801052006041024

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
SEKRETARIAT

DINAS PERHUBUNGAN

2025

KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan stratejik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Sekretaris adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
2. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sekretaris memperjanjikan capaian kinerja Triwulan IV terhadap Kepala Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%
1	Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	90%
2	Terlaksananya pemenuhan realisasi anggaran	Persentase realisasi anggaran	92,80 %
3	Terlaksananya administrasi aset sesuai standar	Persentase aset teradministrasi	100%
4	Terlaksananya pemenuhan realisasi pendapatan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan	86,5%
5	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%
6	Terpenuhinya layanan administrasi tepat waktu	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100%
7	Terpenuhinya pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	95%
8	Terpenuhinya penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%
9	Terlaksananya pemeliharaan barang secara berkala	Persentase barang dipelihara secara berkala	75,9%

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.618.457.987,00	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 76.520.250,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.289.141.700,00	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 24.692.750,00	APBD
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 15.227.000,00	APBD

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 81.523.050,00	APBD
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 319.175.562,00	APBD
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 475.056.750,00	APBD
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 127.650.675,00	APBD
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 249.390.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TA 2025	TARGET TW IV	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	92.41%	92.41%
1	Tercapainya target kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	90%	90%	100.88%	112.09%
2	Terlaksananya pemenuhan realisasi anggaran	Persentase realisasi anggaran	92.80%	92.80%	71.94%	77.52%
3	Terlaksananya administrasi aset sesuai standar	Persentase aset teradministrasi	100%	100%	100%	100.00%
4	Terlaksananya pemenuhan realisasi pendapatan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan	86.50%	86.50%	88%	101.73%
5	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100.00%
6	Terpenuhinya layanan administrasi tepat waktu	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100.00%
7	Terpenuhinya pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	95%	95%	95%	100.00%
8	Terpenuhinya penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100.00%
9	Terlaksananya pemeliharaan barang secara berkala	Persentase barang dipelihara secara berkala	75.90%	75.90%	75.90%	100.00%

Formulasi perhitungan capaian target :

$$= \frac{\text{Jumlah total capaian kegiatan penunjang program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung capaian kinerja program}}$$

$$= (831,72/9) \times 100\% = 92,41\%$$

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah menunjukkan capaian sebesar 112%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja tersebut didasarkan pada tingkat pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan Dinas Perhubungan, dengan nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100,88%.

Capaian yang melampaui target ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain perencanaan kinerja yang terintegrasi dan konsisten antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja), penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan terstruktur. Selain itu, komitmen pimpinan dan aparatur dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, melakukan penyesuaian dan langkah korektif atas deviasi capaian kinerja, serta koordinasi lintas bidang dan lintas perangkat daerah turut berkontribusi signifikan dalam memastikan target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui yang direncanakan.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Persentase realisasi anggaran capaian Realisasi 77,52% karena realisasi anggaran Dinas Perhubungan untuk Tahun 2025 hanya mencapai 71,94%, dari total pagu anggaran Rp28.137.524.059, dengan realisasi keuangan sebesar Rp20.241.744.600,92, menunjukkan capaian kinerja keuangan berada pada predikat kinerja sedang. Persentase realisasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan secara riil di lapangan, mengingat terdapat pekerjaan fisik strategis yang secara fisik telah selesai 100%, namun belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah sampai dengan periode pelaporan.

Adapun pekerjaan dimaksud meliputi Pekerjaan Pemasangan PJU Jalan Poros Burau-Wotu-Malili dengan nilai pencairan yang belum dibayarkan sebesar 95% atau Rp3.095.740.050, serta Pembangunan Terminal Malili dengan pencairan 100% sebesar Rp1.997.318.612,07. Dengan demikian, total nilai anggaran yang belum terbayarkan

mencapai Rp5.093.058.662,07. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap rendahnya persentase realisasi keuangan, meskipun secara fisik kegiatan telah diselesaikan sesuai kontrak.

Apabila kedua pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran, maka realisasi keuangan diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi 90,04% atau sebesar Rp. 25.334.803.262,99. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian realisasi anggaran bukan disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor administratif dan mekanisme pencairan anggaran. Dengan demikian, secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, dan capaian kinerja keuangan diperkirakan akan meningkat seiring dengan penyelesaian proses pembayaran pada tahap selanjutnya

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Persentase Aset Teradministrasi pada Dinas Perhubungan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang mencerminkan bahwa seluruh hasil pengadaan aset telah diadministrasikan secara lengkap dan tepat waktu. Capaian ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib administrasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah, melalui pencatatan aset yang akurat, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah, sehingga mendukung akuntabilitas, pengendalian aset, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,73%, dengan target ditetapkan sebesar 86,50% dan realisasi mencapai 88%. Penetapan target 86,50% dilakukan secara realistis dan berbasis kinerja historis, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya capaian realisasi administrasi data dan informasi pegawai rata-rata berada pada kisaran tersebut. Capaian realisasi yang melampaui target mencerminkan adanya peningkatan kinerja administrasi kepegawaian, khususnya dalam pemutakhiran, ketepatan, dan kelengkapan data pegawai, serta menunjukkan perbaikan tata kelola administrasi kepegawaian yang lebih

tertib, akurat, dan akuntabel dibandingkan periode sebelumnya

e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dengan target dan realisasi masing-masing sebesar 100%. Pencapaian target ini didukung oleh pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dilakukan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, khususnya dalam proses pengajuan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), cuti, serta administrasi kepegawaian lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan konsistensi penerapan standar pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya disiplin dan kepatuhan aparatur dalam pengelolaan dokumen kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan.

f) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu menunjukkan capaian realisasi sebesar 100%, yang menandakan bahwa seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan telah dilaksanakan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan administrasi serta kemampuan perangkat daerah dalam memberikan dukungan pelayanan internal secara konsisten dan tepat waktu.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi secara memadai, meliputi komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu turut mendukung kelancaran koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pendukung tersebut, pelaksanaan layanan administrasi dapat berjalan secara optimal, tertib, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Perhubungan secara menyeluruh.

g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dengan target ditetapkan sebesar 95% dan realisasi sebesar 95%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pengadaan barang telah sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. Adapun adanya perbedaan antara Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2025 dengan pelaksanaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh penyesuaian terhadap urgensi kebutuhan barang yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian tersebut tetap dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memengaruhi ketercapaian indikator kinerja dan tetap mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Perhubungan.

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan menunjukkan capaian realisasi sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perhubungan telah dipenuhi secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja yang baik dalam penyediaan berbagai layanan penunjang operasional perangkat daerah, meliputi jasa surat-menyurat yang mendukung kelancaran administrasi dan koordinasi, jasa sumber daya air dan listrik yang menjamin keberlangsungan operasional sarana dan prasarana perhubungan, serta jasa pelayanan umum yang terdiri atas Pejabat Pengadaan, tenaga Cleaning Service, dan Penjaga Malam.

Terpenuhinya seluruh komponen jasa tersebut secara menyeluruh berkontribusi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, sekaligus memastikan terselenggaranya pelayanan publik di bidang perhubungan secara berkelanjutan, aman, dan tertib. Dengan demikian, realisasi indikator ini menegaskan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang telah berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala menunjukkan capaian realisasi sebesar 100%, yang menandakan bahwa seluruh aset perangkat daerah telah memperoleh pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan jadwal serta standar pemeliharaan yang ditetapkan. Pemeliharaan berkala tersebut meliputi kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional, peralatan dan mesin, serta gedung kantor.

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara terencana dan konsisten guna menjaga kondisi aset tetap layak pakai, andal, dan siap mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Perhubungan. Selain itu, pemeliharaan berkala ini bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih berat, memperpanjang umur manfaat aset, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian biaya perbaikan.

Dengan tercapainya realisasi indikator sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah telah berjalan optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan operasional pelayanan publik di bidang perhubungan

B. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perhubungan	5,618,457,987	5,299,350,620	94.32%	319,107,367.30	5.68%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,618,457,987	5,299,350,619.70	94.32%	319,107,367	5.68%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,520,250	66,164,674.00	86.47%	10,355,576	13.53%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,069,150	21,738,756.00	72.30%	8,330,394	27.70%	Sisa anggaran sebesar Rp8.000.000 merupakan belanja upah jasa yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp330.394 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,485,650	2,326,138.00	93.58%	159,512	6.42%	Sisa anggaran sebesar Rp159.512 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,784,450	2,509,465.00	90.12%	274,985	9.88%	Sisa anggaran sebesar Rp.274.95 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,181,000	39,590,315.00	96.14%	1,590,685	3.86%	Sisa anggaran sebesar Rp.1.045.685 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat. Selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp. 545.000 merupakan belania makan minum	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							rapat yang tidak terealisasi karena beberapa rapat dilaksanakan secara internal dan singkat sehingga tidak membutuhkan konsumsi.	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,249,221,950	4,012,367,506.00	94.43%	236,854,444	5.57%		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,200,810,150	3,966,316,790.00	94.42%	234,493,360	5.58%	Sisa anggaran gaji dan tambahan penghasilan ASN Rp. 234.493.360, terjadi akibat adanya dinamika kepegawaian serta penyesuaian hak keuangan pegawai pada tahun anggaran berjalan, sehingga realisasi belanja lebih rendah dari alokasi anggaran dan terdapat selisih antara perencanaan kebutuhan anggaran dengan realisasi kebutuhan aktual pegawai	Amran Akmal, S.STP
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48,411,800	46,050,716.00	95.12%	2,361,084	4.88%	Sisa anggaran sebesar Rp. 862.500, merupakan sisa makan dan minum rapat yang tidak terealisasi karena Frekuensi rapat lebih rendah dari yang direncanakan. Sementara sisa anggaran sebesar Rp.1.498.584 sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan sisa perjalanan dinas luar daerah.	Amran Akmal, S.STP
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%		
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%	Sisa anggaran sebesar Rp2.200.000 merupakan sisa belanja honor Pengurus Barang yang dibayarkan lebih rendah dari nilai honor sebelumnya mulai bulan November, sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp2.214.970 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah karena pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah dapat diselesaikan melalui optimalisasi koordinasi internal dan pemanfaatan dokumen	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							administrasi yang tersedia. Adapun sisa anggaran sebesar Rp1.040.565 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%		
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%	Sisa Anggaran Rp. 960.000 merupakan sisa honor Bendahara Penerima yang dibayarkan sesuai target pendapatan. Selanjutnya sisa Anggaran Rp. 1.254.970 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan juga terdapat sisa perjalanan dinas dalam daerah	Amran Akmal, S.STP
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,523,050	59,150,347.00	72.56%	22,372,703	27.44%		
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,903,050	11,404,747.00	88.39%	1,498,303	11.61%	Sisa anggaran sebesar Rp.975.000 merupakan sisa belanja perjalanan dinas. Selanjutnya sisa anggaran Rp. 523.303 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat	Amran Akmal, S.STP
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68,620,000	47,745,600.00	69.58%	20,874,400	30.42%	Sisa anggaran terdiri dari belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp15.000.000 dan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5.874.400 yang tidak terealisasi, karena anggaran tersebut direncanakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis urusan Perhubungan, namun hingga akhir tahun anggaran bimbingan teknis tersebut tidak dapat diikuti karena kuota peserta sudah cukup.	Amran Akmal, S.STP
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319,175,562	306,234,099.00	95.95%	12,941,463	4.05%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,542,000	5,541,000.00	99.98%	1,000	0.02%	Sisa anggaran sebesar Rp1 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,946,262	2,568,318.00	65.08%	1,377,944	34.92%	Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.377.944 merupakan sisa belanja ATK dan Bahan Komputer yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal	Amran Akmal, S.STP
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,604,000	51,597,125.00	99.99%	6,875	0.01%	Sisa anggaran sebesar Rp.6.875 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,959,700	15,455,055.00	86.05%	2,504,645	13.95%	Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.504.645 merupakan sisa belanja Cetak dan Penggandaan yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal	Amran Akmal, S.STP
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,660,000	9,440,000.00	97.72%	220,000	2.28%	Sisa anggaran sebesar Rp.220.000 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,355,000	9,342,000.00	99.86%	13,000	0.14%	Sisa anggaran sebesar Rp.13.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk makan dan minum tamu	Amran Akmal, S.STP
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,108,600	212,290,601.00	96.01%	8,817,999	3.99%	Sisa anggaran sebesar Rp4.500.000 merupakan belanja gaji/upah jasa sopir yang dialokasikan untuk rencana perekrutan sopir baru sehubungan dengan sopir dinas sebelumnya yang beralih status menjadi PPPK. Namun hingga akhir tahun anggaran, proses perekrutan sopir baru belum dilaksanakan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp4.317.999 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas	Amran Akmal, S.STP
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475,056,750	459,660,196.70	96.76%	15,396,553	3.24%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Laporan	31,200,000	28,100,000.00	90.06%	3,100,000	9.94%	Sisa anggara sebesar Rp. 3.1000.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	Amran Akmal, S.STP
19	Pengadaan Mebel	119,000,000	116,716,500.00	98.08%	2,283,500	1.92%	Sisa anggara sebesar Rp. 2.283.500 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318,356,750	308,553,249.00	96.92%	9,803,501	3.08%	Sisa anggara sebesar Rp. 9.803.501 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	Amran Akmal, S.STP
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,500,000	6,290,447.70	96.78%	209,552	3.22%	Sisa anggara sebesar Rp.209.552 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan yang direalisasikan	Amran Akmal, S.STP
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,650,675	116,857,907.00	91.55%	10,792,768	8.45%		Amran Akmal, S.STP
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,577,950	18,337,314.00	89.11%	2,240,636	10.89%	Sisa anggaran sebesar Rp.2.240.636 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, dan bahan komputer	Amran Akmal, S.STP
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,412,725	66,220,593.00	90.20%	7,192,132	9.80%	Anggaran sebesar Rp.7.192.132 merupakan sisa dari pembayaran air dan listrik kantor yang terjadi karena realisasi pemakaian air dan listrik lebih rendah dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,660,000	32,300,000.00	95.96%	1,360,000	4.04%	Sisa anggaran sebesar Rp1.360.000 merupakan sisa belanja honor Pejabat Pengadaan yang dibayarkan selama 9 bulan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran dimaksud	Amran Akmal, S.STP
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,390,000	246,666,645.00	98.91%	2,723,355	1.09%		Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,920,000	24,699,410.00	99.11%	220,590	0.89%	Sisa anggara sebesar Rp.220.590 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan dinas karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,460,000	116,115,628.00	98.02%	2,344,372	1.98%	Sisa anggara sebesar Rp.2.344.372 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan operasional karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,010,000	15,900,000.00	99.31%	110,000	0.69%	Sisa anggara sebesar Rp.110.000 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan barabg dan mesin karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,000,000	89,951,607.00	99.95%	48,393	0.05%	Sisa anggara sebesar Rp.209.552 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan gedung kantor karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan yang Mendukung capaian sasaran dan indikator bagian sekretariat, realisasi anggaran mencapai sebesar 94,32 persen melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sub kegiatan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sepenuhnya akibat efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Bidang Perhubungan Darat pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mencapai 92,41%, sedangkan akuntabilitas keuangan berada pada angka 94,32%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berada pada Bagian Sekretariat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan langkah perbaikan yang lebih serius dan berkelanjutan di masa mendatang melalui penyempurnaan tata kelola, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kualitas administrasi dan akuntabilitas kinerja, guna mendukung pencapaian kinerja organisasi secara lebih optimal.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama Triwulan IV Tahun 2025, dapat dirumuskan beberapa saran perbaikan, antara lain dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap realisasi kinerja dan keuangan, serta mengambil langkah-langkah strategis dan korektif guna meningkatkan pencapaian target kinerja dan target keuangan pada tahun anggaran berikutnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Malili, 12 Januari 2026
Sekretaris Dinas
Perhubungan



AMRAN AKMAL, S.STP

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
SUB BAGIAN PERENCANAN &
KEUANGAN

DINAS PERHUBUNGAN

2025

KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kasubag Perencanaan dan Keuangan adalah memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. FUNGSI

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
7. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
8. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
9. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
10. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
11. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
12. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
13. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
14. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
15. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
16. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
17. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
18. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
19. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
20. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

21. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
22. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
2. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kasubag Keuangan dan Perencanaan memperjanjikan capaian kinerja
Triwulan IV terhadap Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 orang
6	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
7	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.069.150,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.485.650,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2.784.450,00	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 41.181.000,00	APBD
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.200.810.150,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 48.411.800,00	APBD
7.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 15.227.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.0%
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100.0%
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100.0%
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100.0%
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109	109	100.0%
6	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100.0%
7	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	100.0%
Capaian					100.0%

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut ditunjukkan dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, Renja Pokok Tahun 2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Terpenuhinya seluruh dokumen perencanaan tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan perangkat daerah telah dilaksanakan secara tepat waktu, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, serta berfungsi sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran dan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD telah terealisasi sesuai dengan target, dengan tersusunnya 2 (dua) dokumen pada Triwulan IV, yaitu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan RKA Pokok Tahun Anggaran 2026.

Terealisasinya penyusunan kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan secara tepat waktu, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan perencanaan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen RKA-SKPD yang disusun menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran serta pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100%, dengan tersusunnya 2 (dua) dokumen, yaitu Dokumen Anggaran Pokok Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tercapainya realisasi indikator ini mencerminkan bahwa proses penetapan dan penjabaran anggaran perangkat daerah telah dilaksanakan secara tepat waktu, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen DPA-SKPD yang disusun menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan serta merupakan instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, yang dicapai melalui terpenuhinya seluruh target output sebanyak 10 (sepuluh) dokumen laporan evaluasi.

Capaian tersebut ditunjukkan dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV sebanyak 4 (empat) dokumen, serta Laporan Evaluasi Renja sebanyak 4 (empat) dokumen. Terpenuhinya seluruh laporan evaluasi tersebut mencerminkan bahwa proses pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah telah dilaksanakan secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan secara berkelanjutan..

5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN telah terealisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, telah dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan kepada 109 orang ASN, yang terdiri atas pembayaran gaji sebanyak 14 (empat belas) bulan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebanyak 13 (tiga belas) bulan.

Penerima pembayaran tersebut meliputi 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 25 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 60 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ini dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung kesejahteraan aparatur serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 18 (delapan belas) dokumen laporan keuangan.

Dokumen laporan tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Tahun 2024, Laporan Keuangan Bulanan Tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) dokumen, Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 2 (dua) dokumen, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tercapainya realisasi indikator ini mencerminkan bahwa proses pencatatan, pelaporan, dan koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan

7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah, masing-masing pada Triwulan I, II, III, dan IV.

Terpenuhinya seluruh laporan tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan dan pelaporan retribusi daerah telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah pada Dinas Perhubungan

B. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perhubungan	4,340,969,200	4,091,544,210	94.25%	249,424,990.00	5.75%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,340,969,200	4,091,544,210	94.25%	249,424,990	5.75%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,520,250	66,164,674.00	86.47%	10,355,576	13.53%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,069,150	21,738,756.00	72.30%	8,330,394	27.70%	Sisa anggaran sebesar Rp8.000.000 merupakan belanja upah jasa yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp330.394 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,485,650	2,326,138.00	93.58%	159,512	6.42%	Sisa anggaran sebesar Rp159.512 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,784,450	2,509,465.00	90.12%	274,985	9.88%	Sisa anggaran sebesar Rp.274.95 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,181,000	39,590,315.00	96.14%	1,590,685	3.86%	Sisa anggaran sebesar Rp.1.045.685 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat. Selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp. 545.000 merupakan belanja makan minum rapat yang tidak terealisasi karena beberapa rapat dilaksanakan secara internal dan singkat sehingga tidak membutuhkan konsumsi.	Amran Akmal, S.STP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,249,221,950	4,012,367,506.00	94.43%	236,854,444	5.57%		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,200,810,150	3,966,316,790.00	94.42%	234,493,360	5.58%	Sisa anggaran gaji dan tambahan penghasilan ASN Rp. 234.493.360, terjadi akibat adanya dinamika kepegawaian serta penyesuaian hak keuangan pegawai pada tahun anggaran berjalan, sehingga realisasi belanja lebih rendah dari alokasi anggaran dan terdapat selisih antara perencanaan kebutuhan anggaran dengan realisasi kebutuhan aktual pegawai	Amran Akmal, S.STP
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48,411,800	46,050,716.00	95.12%	2,361,084	4.88%	Sisa anggaran sebesar Rp. 862.500, merupakan sisa makan dan minum rapat yang tidak terealisasi karena Frekuensi rapat lebih rendah dari yang direncanakan. Sementra sisa anggaran sebesar Rp.1.498.584 sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan sisa perjalanan dinas luar daerah.	Amran Akmal, S.STP
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%		
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%	Sisa Anggaran Rp. 960.000 merupakan sisa honor Bendahara Penerima yang dibayarkan sesuai target pendapatan. Selanjutnya sisa Anggaran Rp.	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							1.254.970 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan juga terdapat sisa perjalanan dinas dalam daerah	

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mencapai 100%, sementara tingkat akuntabilitas keuangan berada pada angka 94,25%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih diperlukan perhatian dan upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, antara lain dalam aspek penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan, ketepatan waktu dan kualitas penganggaran, penguatan pengendalian dan monitoring realisasi anggaran, serta peningkatan ketertiban dan akurasi pelaporan keuangan.

Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas bidang, pemanfaatan data dan sistem informasi perencanaan dan keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta berkontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja Dinas Perhubungan secara keseluruhan pada periode selanjutnya.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama Triwulan IV Tahun 2025, dapat dirumuskan beberapa saran perbaikan, antara lain bahwa dalam proses penyusunan laporan perencanaan dan keuangan masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan data dan dokumen pendukung dari bidang teknis terkait.

Oleh karena itu, ke depan perlu diupayakan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur dengan bidang teknis, termasuk penetapan batas waktu penyampaian data yang lebih jelas, agar proses penyusunan laporan perencanaan dan keuangan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malili, Januari 2026
Kasuabg Perencanaan Keuangan



SRI DEWITA ELIM. ST

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN

DINAS PERHUBUNGAN

2025

KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk segera dilaksanakan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan menganut beberapa azas salah satunya azas akuntabilitas, dimana setiap organisasi atau instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan

B. TUGAS

Tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

C. FUNGSI

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
8. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
9. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
10. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
11. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
12. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
13. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
14. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
15. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
16. menyiapkan bahan dan menyusun analisis formasi jabatan pegawai;
17. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
18. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;

19. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
20. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

D. DASAR KEGIATAN

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
2. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Kasubag Umum dan Kepegawaian memperjanjikan capaian kinerja Triwulan I terhadap Sekretaris Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lap
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Pkt
5.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Pkt
6.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Pkt
7.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Pkt
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dok
9.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap
10.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap
11.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit
12.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit
13.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit
14.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap
15.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 lap
16.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap
17.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
18.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit
19.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit
20.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 24.692.750,00	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 12.903.050,00	APBD
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 68.620.000,00	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.542.000,00	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.946.262,00	APBD
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 51.604.000,00	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.959.700,00	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 9.660.000,00	APBD
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 9.355.000,00	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 221.108.600,00	APBD
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 31.200.000,00	APBD
12.	Pengadaan Mebel	Rp 119.000.000,00	APBD
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 318.356.750,00	APBD
14.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 6.500.000,00	APBD
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.577.950,00	APBD
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 73.412.725,00	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 33.660.000,00	APBD
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 118.460.000,00	APBD
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 24.920.000,00	APBD
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 16.010.000,00	APBD
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 90.000.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	3	100.0%
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100.0%
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	100.0%
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	100.0%
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	100.0%
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100.0%
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100.0%
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	100.0%
9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	100.0%
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100.0%
11	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	100.0%
12	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	25	100.0%
13	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	22	100.0%
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100.0%
15	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	100.0%
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	100.0%
17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100.0%
18	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	100.0%
19	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	38	100.0%
20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100.0%

1) Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah, masing-masing pada Triwulan I, II, III, dan IV.

Terpenuhinya seluruh laporan tersebut mencerminkan bahwa proses penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2) Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 12 (dua belas) dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

Dokumen tersebut meliputi pengelolaan cuti pegawai, kenaikan gaji berkala (KGB), dan kenaikan pangkat, yang dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tercapainya realisasi indikator ini mencerminkan bahwa pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Perhubungan telah berjalan optimal dan mendukung kepastian hak serta kelancaran pengelolaan sumber daya aparatur secara akuntabel.

3) Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui keikutsertaan 5 (lima) orang aparatur Dinas Perhubungan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Keikutsertaan aparatur dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kapasitas sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara tepat, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara profesional dan akuntabel.

4) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui penyediaan 5 (lima) jenis komponen instalasi listrik untuk Gedung Kantor dan Gedung Pengujian.

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan sarana pendukung operasional yang memadai, aman, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

5) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui penyediaan 8 (delapan) jenis peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional, meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja aparatur, serta memastikan terselenggaranya pelayanan perkantoran secara optimal di lingkungan Dinas Perhubungan.

6) Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui penyediaan 2 (dua) jenis bahan logistik, yaitu BBM operasional dan peralatan kebersihan.

Penyediaan bahan logistik tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan

7) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang Disediakan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui penyediaan 3 (tiga) jenis barang cetak dan penggandaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi, dokumentasi, serta penyebaran

informasi, sehingga menunjang efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

8) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui penyediaan 72 (tujuh puluh dua) eksemplar koran dan bahan bacaan lainnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan wawasan, pemahaman regulasi, serta ketersediaan informasi bagi aparatur, sehingga menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) laporan fasilitas kunjungan tamu sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Terpenuhinya laporan fasilitas kunjungan tamu tersebut mencerminkan bahwa kegiatan penerimaan dan fasilitas kunjungan tamu telah dilaksanakan secara tertib, terencana, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung kelancaran koordinasi, komunikasi, dan hubungan kerja Dinas Perhubungan dengan para pemangku kepentingan.

10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi hingga Triwulan IV.

Terpenuhinya laporan kegiatan tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi antarperangkat daerah telah dilaksanakan secara tertib, terencana, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi SKPD.

11) Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan menunjukkan bahwa barang telah tersedia sesuai dengan target, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional, yaitu sepeda motor Suzuki Burgman.

Penyediaan kendaraan dinas operasional tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lapangan dan operasional Dinas Perhubungan, sehingga mobilitas aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan koordinasi dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

12) Tersedianya Mebel

Indikator Kinerja Jumlah Paket Mebel yang Diadakan menunjukkan bahwa telah dilaksanakan pengadaan sebanyak 25 (dua puluh lima) unit mebel, yang terdiri atas 6 (enam) unit lemari arsip, 17 (tujuh belas) buah meja kerja, 1 (satu) unit meja rapat, serta 1 (satu) set kursi dan meja tamu.

Pengadaan mebel tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional perkantoran, meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja aparatur, serta menunjang penataan ruang kerja yang tertib dan fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan

13) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan menunjukkan bahwa telah tersedia sebanyak 22 (dua puluh dua) unit peralatan dan mesin, yang terdiri atas 6 (enam) unit PC, 5 (lima) unit laptop, 1 (satu) unit tablet, 6 (enam) unit printer, 1 (satu) unit web camera, 2 (dua) unit AC, dan 1 (satu) unit gorden.

Penyediaan peralatan dan mesin tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional, meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja aparatur, serta menunjang pemanfaatan teknologi informasi dan kenyamanan lingkungan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan

14) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dipakai di Tahun 2025 hanya untuk menganggarkan kembali hutang Tahun 2024 yang belum terbayar

15) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) laporan penyediaan jasa surat-menyurat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Terpenuhinya laporan tersebut mencerminkan bahwa pelayanan administrasi persuratan telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan

berkesinambungan, sehingga mendukung kelancaran komunikasi, dokumentasi, serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

16) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Terpenuhinya laporan tersebut mencerminkan bahwa penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik sebagai sarana penunjang operasional telah dilaksanakan secara berkesinambungan, tertib, dan tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran aktivitas perkantoran serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

17) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui tersusunnya 4 (empat) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Terpenuhinya laporan tersebut mencerminkan bahwa penyediaan jasa pelayanan umum kantor telah dilaksanakan secara tertib, berkelanjutan, dan tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran operasional perkantoran serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

18) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui pemeliharaan dan pembayaran pajak atas 1 (satu) unit kendaraan dinas.

Pelaksanaan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan kendaraan dalam kondisi laik operasional serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan mobilitas pimpinan/aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan

19) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara serta Dibayarkan Pajak dan Perizinannya menunjukkan realisasi

sebesar 100%, yang dicapai melalui pelaksanaan pemeliharaan, pembayaran pajak, dan pengurusan perizinan terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas operasional, yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan operasional roda empat, 5 (lima) unit kendaraan operasional roda dua, dan 2 (dua) unit kendaraan mobil Penerangan Jalan Umum (PJU).

Seluruh kegiatan pemeliharaan dan pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan dinas tersebut dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan kondisi kendaraan tetap laik operasional serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan

20) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui pelaksanaan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin kerja, meliputi laptop, printer, personal computer (PC), dan air conditioner (AC).

Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin tersebut dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan standar pemeliharaan yang berlaku, sehingga peralatan tetap berfungsi secara optimal, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan

21) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang dicapai melalui pelaksanaan pemeliharaan terhadap 2 (dua) unit gedung kantor.

Kegiatan pemeliharaan gedung kantor tersebut dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga kondisi bangunan tetap laik fungsi, aman, dan nyaman, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan

A. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perhubungan	1,277,488,787	1,207,806,410	94.55%	69,682,377.30	5.45%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,277,488,787	1,207,806,410	94.55%	69,682,377	5.45%		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%		
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%	Sisa anggaran sebesar Rp2.200.000 merupakan sisa belanja honor Pengurus Barang yang dibayarkan lebih rendah dari nilai honor sebelumnya mulai bulan November, sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp2.214.970 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah karena pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah dapat diselesaikan melalui optimalisasi koordinasi internal dan pemanfaatan dokumen administrasi yang tersedia. Adapun sisa anggaran sebesar Rp1.040.565 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,523,050	59,150,347.00	72.56%	22,372,703	27.44%		
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,903,050	11,404,747.00	88.39%	1,498,303	11.61%	Sisa anggaran sebesar Rp.975.000 merupakan sisa belanja perjalanan dinas. Selanjutnya sisa anggaran Rp. 523.303 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat	Amran Akmal, S.STP
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68,620,000	47,745,600.00	69.58%	20,874,400	30.42%	Sisa anggaran terdiri dari belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp15.000.000 dan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5.874.400 yang tidak terealisasi, karena anggaran tersebut direncanakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis urusan Perhubungan, namun hingga akhir tahun anggaran bimbingan teknis tersebut tidak dapat diikuti karena kuota peserta sudah cukup.	Amran Akmal, S.STP
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319,175,562	306,234,099.00	95.95%	12,941,463	4.05%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,542,000	5,541,000.00	99.98%	1,000	0.02%	Sisa anggaran sebesar Rp1 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,946,262	2,568,318.00	65.08%	1,377,944	34.92%	Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.377.944 merupakan sisa belanja ATK dan Bahan Komputer yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal	Amran Akmal, S.STP
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,604,000	51,597,125.00	99.99%	6,875	0.01%	Sisa anggaran sebesar Rp.6.875 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,959,700	15,455,055.00	86.05%	2,504,645	13.95%	Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.504.645 merupakan sisa belanja Cetak dan Penggandaan yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal	Amran Akmal, S.STP
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,660,000	9,440,000.00	97.72%	220,000	2.28%	Sisa anggaran sebesar Rp.220.000 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,355,000	9,342,000.00	99.86%	13,000	0.14%	Sisa anggaran sebesar Rp.13.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk makan dan minum tamu	Amran Akmal, S.STP
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,108,600	212,290,601.00	96.01%	8,817,999	3.99%	Sisa anggaran sebesar Rp4.500.000 merupakan belanja gaji/upah jasa sopir yang dialokasikan untuk rencana perekrutan sopir baru sehubungan dengan sopir dinas sebelumnya yang beralih status menjadi PPK. Namun hingga akhir tahun anggaran, proses perekrutan sopir baru belum dilaksanakan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp4.317.999 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas	Amran Akmal, S.STP
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475,056,750	459,660,196.70	96.76%	15,396,553	3.24%		
18	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Laporan	31,200,000	28,100,000.00	90.06%	3,100,000	9.94%	Sisa anggara sebesar Rp. 3.1000.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Pengadaan Mebel	119,000,000	116,716,500.00	98.08%	2,283,500	1.92%	Sisa anggara sebesar Rp. 2.283.500 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318,356,750	308,553,249.00	96.92%	9,803,501	3.08%	Sisa anggaran sebesar Rp. 9.803.501 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	Amran Akmal, S.STP
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,500,000	6,290,447.70	96.78%	209,552	3.22%	Sisa anggaran sebesar Rp.209.552 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan yang direalisasikan	Amran Akmal, S.STP
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,650,675	116,857,907.00	91.55%	10,792,768	8.45%		Amran Akmal, S.STP
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,577,950	18,337,314.00	89.11%	2,240,636	10.89%	Sisa anggaran sebesar Rp.2.240.636 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, dan bahan komputer	Amran Akmal, S.STP
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,412,725	66,220,593.00	90.20%	7,192,132	9.80%	Anggaran sebesar Rp.7.192.132 merupakan sisa dari pembayaran air dan listrik kantor yang terjadi karena realisasi pemakaian air dan listrik lebih rendah dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,660,000	32,300,000.00	95.96%	1,360,000	4.04%	Sisa anggaran sebesar Rp1.360.000 merupakan sisa belanja honor Pejabat Pengadaan yang dibayarkan selama 9 bulan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran dimaksud	Amran Akmal, S.STP
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,390,000	246,666,645.00	98.91%	2,723,355	1.09%		Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,920,000	24,699,410.00	99.11%	220,590	0.89%	Sisa anggara sebesar Rp.220.590 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan dinas karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,460,000	116,115,628.00	98.02%	2,344,372	1.98%	Sisa anggara sebesar Rp.2.344.372 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan operasional karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,010,000	15,900,000.00	99.31%	110,000	0.69%	Sisa anggara sebesar Rp.110.000 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan barabg dan mesin karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,000,000	89,951,607.00	99.95%	48,393	0.05%	Sisa anggara sebesar Rp.209.552 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan gedung kantor karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap seluruh indikator kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran mencapai 100%, sementara tingkat akuntabilitas keuangan tercatat sebesar 94,55%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh indikator kinerja, antara lain penyusunan 4 (empat) dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah, 4 (empat) laporan penatausahaan Barang Milik Daerah, serta 12 (dua belas) dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang mencakup pengelolaan cuti, kenaikan gaji berkala (KGB), dan kenaikan pangkat.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga terlaksana melalui keikutsertaan 5 (lima) orang aparatur dalam kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran juga terealisasi secara optimal, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perencanaan.

Pelaksanaan layanan penunjang administrasi perkantoran juga terlaksana dengan baik, yang ditunjukkan melalui penyusunan laporan penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor, fasilitas kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang seluruhnya mencapai realisasi 100%.

Di bidang pengelolaan aset, telah tersedia dan terpelihara kendaraan dinas operasional dan kendaraan jabatan, termasuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat, serta pengadaan sarana pendukung kerja berupa mebel dan peralatan mesin lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

2. SARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan IV tahun 2025 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- 1) Mempertahankan konsistensi pelaksanaan pelayanan administrasi
Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan layanan administrasi umum dan kepegawaian agar tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan target waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kegiatan
Melakukan perencanaan kegiatan secara lebih terukur serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berjalan efektif dan efisien.
- 3) Memperkuat pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis ketepatan data
Meningkatkan ketertiban dan akurasi dalam pengelolaan data kepegawaian, termasuk administrasi cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pengelolaan kehadiran pegawai, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara rutin dan terjadwal guna menjamin ketersediaan fasilitas kerja yang layak, aman, dan mendukung produktivitas aparatur.
- 5) Peningkatan kompetensi aparatur
Mendorong aparatur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan pengembangan kapasitas lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi, guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan.
- 6) Penguatan koordinasi internal
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi, pengelolaan kepegawaian, serta penyediaan layanan penunjang organisasi.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
Mengoptimalkan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas organisasi.

Malili, Januari 2026
Kasubag Umum dan
Kepegawaian



ASNITA SARI. SE

The background of the page is an abstract design featuring flowing, wavy lines in various shades of blue and white. These lines create a sense of movement and depth. Scattered throughout the design are small, light blue dots, some of which are slightly larger and more prominent than others, adding a textured, starry effect to the overall composition.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

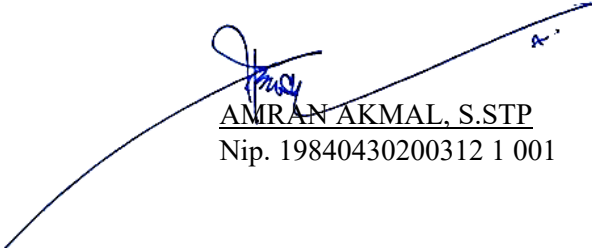
Nama : AMRAN AKMAL, S.STP
NIP : 19840430 200312 1 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : ASNITA SARI, SE
NIP : 19830313 200902 2 006
Jabatan : Kasubag Umum & Kepegawaian

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan


AMRAN AKMAL, S.STP
Nip. 19840430200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

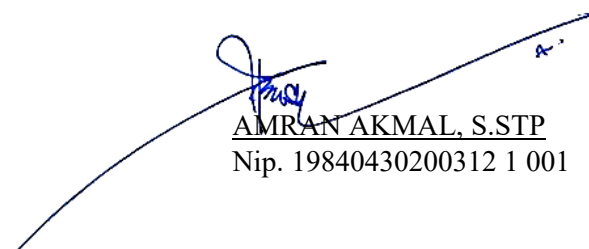
Nama : AMRAN AKMAL, S.STP
NIP : 19840430 200312 1 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : SRI DEWITA ELIM, ST
NIP : 19880326 201404 2 001
Jabatan : Kasubag Perencanaan & Keuangan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan


AMRAN AKMAL, S.STP
Nip. 19840430200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan fisik pada program/kegiatan pada Bagian Sekretariat, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2026, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kasubag Perencanaan dan Keuangan :

- Menyempurnakan dokumen perencanaan (Renja, RKA, PK) dengan:
Indikator kinerja yang spesifik, terukur, relevan, dan berbasis outcome.
Penjabaran target triwulanan untuk memudahkan monitoring.
- Melaksanakan review internal perencanaan secara berkala (per triwulan).
- Mengoptimalkan peran Subbag Perencanaan sebagai:
Koordinator penyusunan laporan kinerja (LKjIP, Monev).
Pengendali konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- Menyusun timeline baku penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan perubahan
- Meningkatkan ketepatan waktu Penyampaian SPM, SPJ, dan laporan realisasi anggaran
- Memperkuat fungsi verifikasi internal dengan:
Checklist kelengkapan administrasi keuangan.
Pemeriksaan kesesuaian dengan standar biaya dan regulasi terbaru.
- Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran secara periodik (bulanan).
- Meningkatkan pemahaman regulasi keuangan melalui Sosialisasi peraturan perbendaharaan dan pengadaan barang/jasa

b) Kasubag Umum dan Kepegawaian

- Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset secara berkala.
- Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana berbasis prioritas.
- Menerapkan sistem Persuratan elektronik (e-office) & Kearsipan sesuai klasifikasi arsip dan JRA.
- Meningkatkan pemeliharaan rutin Gedung, kendaraan dinas, dan peralatan kerja.
- Menyusun analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan secara periodik.
- Mengoptimalkan pengelolaan data ASN melalui:
Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.
Integrasi dengan sistem kepegawaian nasional/daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

- Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai melalui:
Monitoring kehadiran dan kinerja harian.
Evaluasi kinerja berbasis SKP.
- Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai tahunan.
- Memperkuat pembinaan pegawai melalui:
Sosialisasi peraturan kepegawaian.
Pendampingan administrasi kenaikan pangkat dan jabatan

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan.

Malili, 12 Januari 2026
Sekretaris Dinas Perhubungan



AMRAN AKMAL, S.STP
NIP. 198404302003121001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

Malili, 12 Januari 2025

Nomor : 500.11/14/Dishub/2025
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat

Yth. 1. Kasubag Umum & Kepegawaian
2. Kasubag Perencanaan & Keuangan
3. Bendahara Pengeluaran &
Penerimaan
4. Pengurus Barang
5. Staf lingkup Sekretariat
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan triwulan 4 tahun anggaran 2025, maka akan dilakukan rapat evaluasi internal terhadap capaian program dan kegiatan lingkup Sekertariat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Pukul : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Sekretaris

Demikian Disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,



AMRAN AKMAL, S.STP

Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198404302003121001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T

NIP : 197609232003121005

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : AMRAN AKMAL, S.STP

NIP : 19840430 200312 1 001

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan



Ir. H. SYAHMUDDIN, S.T., M.T
Nip. 197609232003121005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T

NIP : 197609232003121005

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : ARHAM ALQAF, S.IP.,M.Tr.A.P

NIP : 19760427 199603 1 003

Jabatan : Kepala Bidang Angkutan Jalan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan



Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T
Nip. 197609232003121005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T

NIP : 197609232003121005

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : JAMALUDDIN A, S.Sos

NIP : 19690407 198903 1 014

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas & Keselamatan Jalan

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan



Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T
Nip. 197609232003121005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-01-2026), bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T

NIP : 197609232003121005

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Telah melakukan evaluasi internal terhadap :

Nama : USMAN JUNAEDI, ST

NIP : 19680105 200604 1 024

Jabatan : Kepala Bidang Pelayaran

Terkait realisasi kinerja dan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Malili, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan



Ir.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T
Nip. 197609232003121005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan fisik pada program/kegiatan Dinas Perhubungan, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2026, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Bidang Lalu Lintas & Keselamatan Jalan

➤ Peningkatan kualitas survei volume lalu lintas

Survei jumlah dan karakteristik volume lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Luwu Timur perlu dilaksanakan secara lebih terencana, berkelanjutan, dan berbasis metode yang terstandar, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen lalu lintas.

➤ Optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan perlu terus ditingkatkan dengan mengutamakan ruas jalan prioritas dan lokasi rawan kecelakaan, guna menjamin fungsi perlengkapan jalan tetap optimal dalam mendukung keselamatan pengguna jalan.

➤ Penyempurnaan pendataan perlengkapan jalan

Data perlengkapan jalan perlu dilengkapi, diperbarui secara berkala, dan disusun secara sistematis agar dapat menjadi basis data yang akurat dalam perencanaan pemeliharaan, pengembangan, serta evaluasi kinerja keselamatan jalan.

➤ Penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara lebih terpadu, termasuk penataan arus lalu lintas, pengaturan persimpangan, dan penerapan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kemacetan dan kawasan strategis, guna meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

➤ Percepatan pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Diperlukan percepatan pengoperasian layanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui pemenuhan sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem pelayanan, sehingga layanan PKB dapat beroperasi secara optimal dan mendukung peningkatan keselamatan kendaraan di jalan.

➤ Peningkatan koordinasi lintas sektor

Koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, perangkat daerah teknis, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu diperkuat dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan keselamatan jalan, khususnya pada kegiatan yang bersifat lintas kewenangan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429

MALILI, 92981

- Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, serta didukung oleh pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

b) Bidang Angkutan Jalan

- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pemeliharaan terminal

Perlu dilakukan perencanaan yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan lapangan dalam pembangunan serta pemeliharaan terminal, termasuk penyesuaian terhadap standar teknis dan kebutuhan pengguna jasa, agar fungsi terminal dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan terminal

Diperlukan peningkatan pengawasan dan pemeliharaan terminal secara rutin dan terjadwal guna menjaga kondisi sarana dan prasarana tetap laik fungsi, aman, dan nyaman, serta mendukung kelancaran operasional angkutan umum.

- Penguatan pengawasan dan penataan perparkiran

Pengawasan perparkiran perlu ditingkatkan melalui penataan lokasi parkir, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perparkiran, serta optimalisasi peran petugas lapangan, guna mendukung ketertiban lalu lintas dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.

- Peningkatan efektivitas penyediaan dan operasional bus sekolah

Penyediaan bus sekolah perlu diiringi dengan pengaturan operasional yang lebih optimal, termasuk penetapan rute, jadwal layanan, dan pengawasan operasional, sehingga layanan bus sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pelajar.

- Penguatan pengawasan trayek angkutan umum

Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan angkutan umum pada trayek yang telah ditetapkan, termasuk penertiban trayek tidak resmi, guna menjaga keteraturan layanan angkutan umum serta meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

JL. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429

MALILI, 92981

- Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan bandara
Penyusunan dokumen perencanaan bandara perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dengan kebijakan transportasi daerah dan rencana tata ruang wilayah, serta melibatkan koordinasi lintas sektor dan instansi terkait, agar dokumen yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Angkutan, khususnya yang bersifat lintas kewenangan.
- Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilaksanakan secara berkala dan sistematis, serta diikuti dengan penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

c) Bidang Pelayaran

- Peningkatan kualitas pendataan kecelakaan kapal
Pendataan jumlah dan karakteristik kecelakaan kapal perlu dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha pelayaran, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan keselamatan pelayaran.
- Optimalisasi kepemilikan Pas Kecil kapal GT < 7
Diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal berukuran GT < 7 mengenai pentingnya kepemilikan Pas Kecil, serta penyederhanaan proses fasilitasi administrasi, guna meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan keselamatan pelayaran.
- Penguatan pengawasan kegiatan di dermaga
Pengawasan aktivitas di dermaga perlu ditingkatkan secara rutin dan terjadwal, khususnya terkait keselamatan penumpang dan barang, kepatuhan terhadap prosedur sandar dan bongkar muat, serta ketertiban operasional, guna meminimalkan potensi kecelakaan dan gangguan operasional.
- Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana dermaga
Pemeliharaan dermaga perlu dilaksanakan secara berkala dan terencana untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana tetap laik fungsi, aman, dan mendukung kelancaran aktivitas pelayaran, terutama pada dermaga yang memiliki tingkat aktivitas tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

➤ Penguatan koordinasi lintas sektor

Koordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti syahbandar, aparat keamanan, dan perangkat daerah lainnya, perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pengawasan pelayaran dan pengelolaan dermaga secara terpadu.


➤ Peningkatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara berkala dan sistematis, serta didukung oleh pelaporan kinerja yang tepat waktu dan akurat sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya

d) Bagian Sekretariat

- Mempertahankan dan berupaya meningkatkan capaian realisasi kinerja dan keuangan untuk tahun 2026
- Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan kesesuaian rencana belanja dengan nomor rekening belanja agar tidak terjadi kesalahan penganggaran
- Penyusunan laporan kegiatan maupun keuangan disusun sesuai waktu yang telah ditentukan
- Percepatan pelaksanaan kegiatan Fisik maupun pengadaan barang dan jasa pada lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan
- Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan berdasarkan anggaran kas.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat Dinas Perhubungan.

Malili, 15 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan

D. H. SYAHMUDDIN, S.T., M.T
Nip. 197609232003121005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp.(0474) 321 429
MALILI, 92981

Malili, 13 Januari 2026

Nomor : 500.11/ 26 /Dishub/2026
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat

Yth. 1. Sekretaris Dinas Perhubungan
2. Kepala Bidang Lingkup Dinas
Perhubungan
3. Kepala Seksi dan Kasubag Lingkup
Dinas Perhubungan
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Penerimaan
6. Pengurus Barang
7. PPK SKPD
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan anggaran triwulan IV, maka akan dilakukan rapat evaluasi internal terhadap capaian realisasi kinerja dan keuangan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Pukul : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan

Demikian Disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



Ir. H. Syahmuddin, S.T., M.T
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19760923 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. SOEKARNO HATTA TELP/FAX. (0474) 321429.

MALILI 92981

DAFTAR HADIR RAPAT DINAS PERHUBUNGAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Januari 2026

Tempat : Dinas Perhubungan

No.	Nama	Jabatan	P/L	TTD	KET
1	SYAHMUDIN	KAPIS	L	1	
2	Amran Akmal	SEKDIS	L	2	
3	Arif Alif	Kabid Anger	L	3	
4	Usman Jumaedi	Kabid Pelayanan	L	4	
5	Tamaleddin A	Kabid Lalin	L	5	
6	Asmi San	Kanbeng		6	
7	UNTUNG PITORYU	Kasi Pelayanan	L	7	
8	ATRIS	Kasi ASDP	L	8	
9	Thomas . A	Kasi. Kapalabekuan	L	9	
10	RUSTAM	Kasi TERMINAL	L	10	
11	Kawir	Kasi Lalin	L	11	
12	SRI DEWITA ELIM	Kanbeng Paron	P	12	
13	M. Pirya Bachtiar	Perencana	L	13	
14				14	
15	I Dewa Gede Ba		L	15	

Mengetahui,
Pimpinan Rapat,

Dokumentasi Rapat





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429

Email : dishubluwutimurkab.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Evaluasi Pelaksanaan Program Triwulan IV TA 2025

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Januari 2025

Waktu : 09.00 Wita - Selesai

Catatan Rapat

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Triwulan IV TA 2025 dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan
2. Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag, Bendahara serta staf bagian keuangan
3. Memperhatikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan 4 tahun anggaran 2025, maka direkomendasikan kepada penanggung jawab kegiatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bidang Lalu Lintas & Keselamatan Jalan

- a. Peningkatan kualitas survei volume lalu lintas
Survei jumlah dan karakteristik volume lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Luwu Timur perlu dilaksanakan secara lebih terencana, berkelanjutan, dan berbasis metode yang terstandar, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen lalu lintas.
- b. Optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan perlu terus ditingkatkan dengan mengutamakan ruas jalan prioritas dan lokasi rawan kecelakaan, guna menjamin fungsi perlengkapan jalan tetap optimal dalam mendukung keselamatan pengguna jalan.
- c. Penyempurnaan pendataan perlengkapan jalan
Data perlengkapan jalan perlu dilengkapi, diperbarui secara berkala, dan disusun secara sistematis agar dapat menjadi basis data yang akurat dalam perencanaan pemeliharaan, pengembangan, serta evaluasi kinerja keselamatan jalan.
- d. Penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara lebih terpadu, termasuk penataan arus lalu lintas, pengaturan persimpangan, dan penerapan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kemacetan dan kawasan strategis, guna meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- e. Percepatan pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Diperlukan percepatan pengoperasian layanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui pemenuhan sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem pelayanan, sehingga layanan PKB dapat beroperasi secara optimal dan mendukung peningkatan keselamatan kendaraan di jalan.

- f. Peningkatan koordinasi lintas sektor
Koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, perangkat daerah teknis, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu diperkuat dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan keselamatan jalan, khususnya pada kegiatan yang bersifat lintas kewenangan.
- g. Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, serta didukung oleh pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya

Bidang Lalu Lintas & Keselamatan Jalan

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pemeliharaan terminal
Perlu dilakukan perencanaan yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan lapangan dalam pembangunan serta pemeliharaan terminal, termasuk penyesuaian terhadap standar teknis dan kebutuhan pengguna jasa, agar fungsi terminal dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan terminal
Diperlukan peningkatan pengawasan dan pemeliharaan terminal secara rutin dan terjadwal guna menjaga kondisi sarana dan prasarana tetap laik fungsi, aman, dan nyaman, serta mendukung kelancaran operasional angkutan umum.
- 3) Penguatan pengawasan dan penataan perparkiran
Pengawasan perparkiran perlu ditingkatkan melalui penataan lokasi parkir, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perparkiran, serta optimalisasi peran petugas lapangan, guna mendukung ketertiban lalu lintas dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.
- 4) Peningkatan efektivitas penyediaan dan operasional bus sekolah
Penyediaan bus sekolah perlu diiringi dengan pengaturan operasional yang lebih optimal, termasuk penetapan rute, jadwal layanan, dan pengawasan operasional, sehingga layanan bus sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pelajar.
- 5) Penguatan pengawasan trayek angkutan umum
Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan angkutan umum pada trayek yang telah ditetapkan, termasuk penertiban trayek tidak resmi, guna menjaga keteraturan layanan angkutan umum serta meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan bandara
Penyusunan dokumen perencanaan bandara perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dengan kebijakan transportasi daerah dan rencana tata ruang wilayah, serta melibatkan koordinasi lintas sektor dan instansi terkait, agar dokumen yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif.
- 7) Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Angkutan, khususnya yang bersifat lintas kewenangan.
- 8) Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilaksanakan secara berkala dan sistematis, serta diikuti dengan penyusunan

laporan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya

Bidang Pelayaran

- a. Peningkatan kualitas pendataan kecelakaan kapal
Pendataan jumlah dan karakteristik kecelakaan kapal perlu dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha pelayaran, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan keselamatan pelayaran.
- b. Optimalisasi kepemilikan Pas Kecil kapal GT < 7
Diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal berukuran GT < 7 mengenai pentingnya kepemilikan Pas Kecil, serta penyederhanaan proses fasilitasi administrasi, guna meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan keselamatan pelayaran.
- c. Penguatan pengawasan kegiatan di dermaga
Pengawasan aktivitas di dermaga perlu ditingkatkan secara rutin dan terjadwal, khususnya terkait keselamatan penumpang dan barang, kepatuhan terhadap prosedur sandar dan bongkar muat, serta ketertiban operasional, guna meminimalkan potensi kecelakaan dan gangguan operasional.
- d. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana dermaga
Pemeliharaan dermaga perlu dilaksanakan secara berkala dan terencana untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana tetap laik fungsi, aman, dan mendukung kelancaran aktivitas pelayaran, terutama pada dermaga yang memiliki tingkat aktivitas tinggi.
- e. Penguatan koordinasi lintas sektor
Koordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti syahbandar, aparat keamanan, dan perangkat daerah lainnya, perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pengawasan pelayaran dan pengelolaan dermaga secara terpadu.
- f. Peningkatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara berkala dan sistematis, serta didukung oleh pelaporan kinerja yang tepat waktu dan akurat sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Bagian Sekretariat

- a. Menyempurnakan dokumen perencanaan (Renja, RKA, PK) dengan:
Indikator kinerja yang spesifik, terukur, relevan, dan berbasis outcome.
Penjabaran target triwulanan untuk memudahkan monitoring.
- b. Melaksanakan review internal perencanaan secara berkala (per triwulan).
- c. Mengoptimalkan peran Subbag Perencanaan sebagai:
Koordinator penyusunan laporan kinerja (LKjIP, Monev).
Pengendali konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- d. Menyusun timeline baku penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan perubahan
- e. Meningkatkan ketepatan waktu Penyampaian SPM, SPJ, dan laporan realisasi anggaran

- f. Memperkuat fungsi verifikasi internal dengan:
Checklist kelengkapan administrasi keuangan.
Pemeriksaan kesesuaian dengan standar biaya dan regulasi terbaru.
- g. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran secara periodik (bulanan).
- h. Meningkatkan pemahaman regulasi keuangan melalui Sosialisasi peraturan perbendaharaan dan pengadaan barang/jasa
- i. Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset secara berkala.
- j. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana berbasis prioritas.
- k. Menerapkan sistem Persuratan elektronik (e-office) & Kearsipan sesuai klasifikasi arsip dan JRA.
- l. Meningkatkan pemeliharaan rutin Gedung, kendaraan dinas, dan peralatan kerja.
- m. Menyusun analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan secara periodik.
- n. Mengoptimalkan pengelolaan data ASN melalui:
Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.
Integrasi dengan sistem kepegawaian nasional/daerah.
- o. Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai melalui:
Monitoring kehadiran dan kinerja harian.
Evaluasi kinerja berbasis SKP.
- p. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai tahunan.
- q. Memperkuat pembinaan pegawai melalui:
Sosialisasi peraturan kepegawaian.
Pendampingan administrasi kenaikan pangkat dan jabatan.

Notulen,



Sri Dewita Elim, ST

NIP. 198803262014042001